



LKj

LAPORAN KINERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PESISIR SELATAN



TAHUN 2023



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
INSPEKTORAT DAERAH

Jln. Pahlawan No. 1 Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651

Telp. (0756) 21601/ Fax. (0756) 21601,

Laman : <https://inspekda.pesisirselatankab.go.id> Pos-el: inspektoratpessel@yahoo.co.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kami telah mereviu Laporan Kinerja instansi pemerintah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan untuk tahun anggaran 2023 sesuai dengan Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Painan, 7 Maret 2024

Inspektur,



Rusliyanto, S.H., M.Hum.
Periksa Utama Muda (IV/c)
198411121992031008



IKHTISAR EXECUTIVE

Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 disusun sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam Peraturan Presiden tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Oleh karena itu, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah, harus pula mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dalam bentuk penyampaian Laporan Kinerja (LKj).

Penyusunan LKj ini dimaksudkan untuk mempertanggungjawabkan perwujudan Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan melalui tujuan dan sasaran strategis. Tujuan dan sasaran strategis dicapai melalui kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBD Kabupaten Pesisir Selatan serta terciptanya sistem pelaporan akuntabilitas yang dapat meningkatkan kepercayaan terhadap Pemerintah, dan meningkatkan kinerja instansi Pemerintah dalam menjalankan misi, serta diharapkan dapat terciptanya Kepemerintahan yang baik (*good governance*).

Penyusunan LKj Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 ini, disusun dengan berpedoman pada Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Sistem



Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari penilaian yang sistemik dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator masukan, keluaran, dan hasil. Secara rinci pengukuran kinerja tersebut dilakukan dengan mengevaluasi sasaran strategis yang didukung oleh Program/Kegiatan yang bersumber dari Dana APBD Kabupaten.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, khususnya pada Misi Keenam, yaitu **Mewujudkan Kondisi Masyarakat Yang Aman Tentram Dan Dinamis** maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan menetapkan tujuan, yaitu (1) Terwujudnya Reformasi Birokrasi Yang Berkinerja Tinggi (2) Terciptanya Kondisi Masyarakat Pesisir Selatan Yang Aman, Tentram dan Dinamis. Tujuan tersebut dijabarkan melalui 3 (tiga) sasaran strategis, yaitu (1) Terwujudnya Pemerintahan Yang Akuntabel dan Berkinerja (2) Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah (3) Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan dan Menjaga Lingkungan secara Mandiri. Maka, untuk mewujudkan itu semua, ditetapkan Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2023 yang dapat dilihat target dan capaiannya secara lengkap pada tabel berikut :



Misi 6 : Mewujudkan Kondisi Masyarakat Yang Aman Tentram dan Dinamis

Tabel 1
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	Satuan	Target	Realisasi capaian	% Capaian	Predikat
1.	Terwujudnya Pemerintahan Yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Tanpa Satuan	A (81)	A (80.26)	99.09	Menunggu Hasil Penilaian SAKIP
2.	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi PD	Tanpa Satuan	100	87	87	Sangat Baik
3.	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dan Menjaga Lingkungan Secara Mandiri	Cakupan pencegahan atau tangkal dini konflik	Persen	80 %	100	125	Sangat Baik
		Cakupan Peningkatan Pendidikan Wawasan Kebangsaan dan Pendidikan Politik	Persen	30 %	40	133	Sangat Baik
		Rata-rata Capaian				111.10	Sangat Baik

*Nilai LKj tahun 2022

Dari 3 Sasaran Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan 4 indikator kinerja , dimana 3 (tiga) indikator dapat dilaksanakan dengan **sangat baik** dan 1 indikator sasaran yang masih dalam proses penilaian yaitu indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.



Evaluasi atas rata-rata data pendukung dan permasalahan pada setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, untuk merumuskan kembali program dan kegiatan yang benar benar menunjang secara langsung pencapaian target dan sasaran.

Hasil evaluasi capaian kinerja diharapkan dapat dijadikan acuan dalam penentuan kebijakan dimasa mendatang dan dapat memberikan kontribusi positif dalam penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023 telah selesai di susun.

Laporan Kinerja (LKj) merupakan salah satu cara perbaikan kinerja organisasi yang harus terus dilakukan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan transparan. Laporan ini disusun secara periodik berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, maka setiap Instansi Pemerintah harus menyusun Laporan Kinerja (LKj).

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 181 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang berupaya melakukan berbagai Program dan Kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, mulai dari perencanaan, pelaksanaan anggaran dan pencapaian hasilnya, serta pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah ini.

Dalam pelaksanaan Program/kegiatan dalam tahun anggaran 2023, masih ditemui beberapa kendala-kendala dalam pelaksanaannya namun dengan dukungan berbagai pihak terutama Pengguna Anggaran, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan instansi terkait, semua hambatan-hambatan tersebut dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



Laporan ini akan dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk pelaksanaan program dan kegiatan dimasa yang akan datang agar semakin baik dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Pesisir Selatan.

Painan, 22 Februari 2024

Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Pesisir Selatan



MULYANDRI, ST, MM
Perata Tk. I (III/d)
NIP. 19760308 200701 1 002



DAFTAR ISI

IKHTISAR EXECUTIVE	i
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	2
1.3 Dasar Hukum	3
1.4 Gambaran Umum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	4
1.5 Struktur Organisasi	6
1.6 Kepegawaian	7
1.7 Sistematika Penulisan	12
1.8 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	13
1.9 Isu – Isu Strategis	15
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	17
2.1 Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026	17
2.2 Perjanjian Kinerja	20
2.3 Indikator Kinerja Utama	21
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	25
3.1 Metodologi Pengukuran Capaian Kinerja	25
3.2 Hasil Pengukuran Kinerja	26
3.3 Capaian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	28
3.4 Realisasi Anggaran	60
BAB IV PENUTUP	62
4.1 Kesimpulan	62
4.2 Saran	63
LAMPIRAN	65

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, maka setiap Instansi Pemerintah harus menyusun Laporan Kinerja (LKj).

Laporan Kinerja merupakan bentuk pertanggung jawaban atas capaian kinerja organisasi/Instansi Pemerintah secara transparan dan akuntabel, untuk itu pada setiap akhir tahun anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang sebelumnya merupakan bagian pada Sekretariat Daerah sebagai salah satu Perangkat Daerah (PD) pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang terbentuk berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 181 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik maka menyusun Laporan Kinerja. Laporan Kinerja ini disusun untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2022. Akuntabilitas kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik diwujudkan melalui pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja program dan kegiatan yang menjadi tujuan dalam sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Penyusunan LKj dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. LKj Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

disampaikan kepada Bupati Pesisir Selatan untuk dikompilasi menjadi LKj Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, setiap Entitas Akuntabilitas Kinerja (wajib) menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Entitas Akuntabilitas Kinerja tersebut menyelenggarakan SAKIP secara berjenjang, dengan tingkatan mulai dari entitas akuntabilitas kinerja satuan kerja, hingga entitas akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan Laporan Kinerja (LKj) adalah pengukuran dan evaluasi kinerja, serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Dengan adanya Laporan Kinerja (LKj), dapat diketahui tingkat capaian kinerja suatu unit organisasi dan hal lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya, terutama gambaran mengenai tingkat kesesuaian antara program dan kegiatan yang direncanakan dengan realisasinya.

Laporan ini dapat juga digunakan sebagai acuan dalam menyusun rencana kinerja dan rencana anggaran di tahun mendatang. Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Format Laporan Kinerja (LKj) pada dasarnya menyajikan informasi tentang uraian singkat organisasi; rencana dan target kinerja yang ditetapkan; pengukuran kinerja; dan evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil program/kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud (termasuk analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya).

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 ini adalah untuk memberikan gambaran kinerja

penyelenggaraan pemerintahan di bidang Politik yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan serta sebagai wujud pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pencapaian target sasaran tahun 2022. Adapun maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Aspek Akuntabilitas Kinerja: bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 sebagai sarana pertanggung jawaban Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Tahun 2023 atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh selama tahun 2023. Esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sampai sejauh mana visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang telah dicapai selama tahun 2023.
2. Aspek Manajemen Kinerja: bagi keperluan internal organisasi, menjadikan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja oleh manajemen Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 bagi upaya -upaya perbaikan kinerja di masa datang.

1.3. DASAR HUKUM

Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 disusun mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya antara lain :

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021–2026;
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 181 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 182 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2021-2026.

1.4. GAMBARAN UMUM BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan berkedudukan di Jalan Rohana Kudus Painan Kecamatan IV Jurai. Gedung kantor dengan kondisi yang kurang baik dan fasilitas yang masih kurang lengkap. Adapun gedung Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ini merupakan Gedung Dinas Lingkungan Hidup yang saat ini bergabung dengan Dinas Perkimtan Kabupaten Pesisir Selatan.

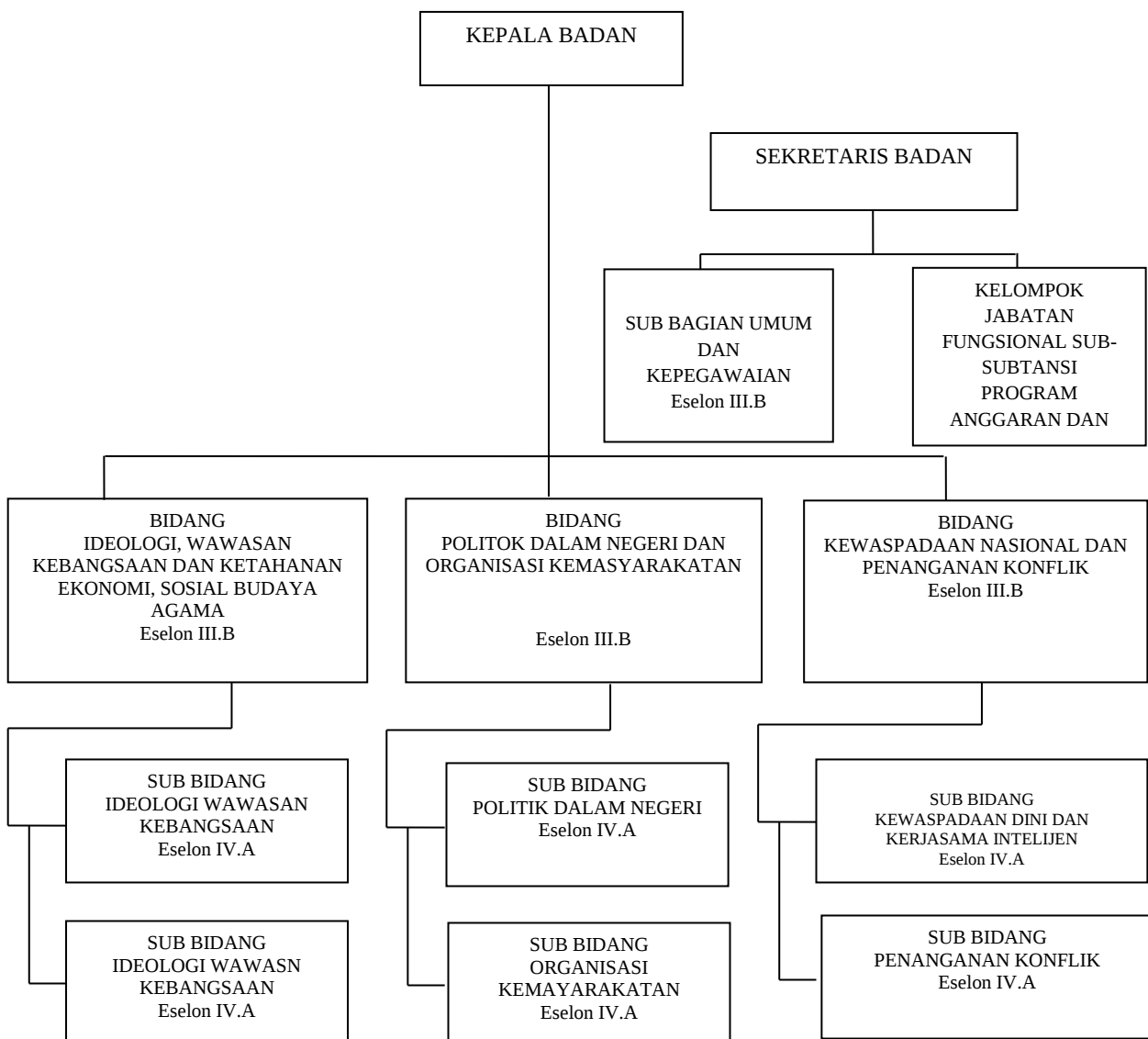
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas membantu pimpinan daerah mewujudkan visi dan misi daerah dengan fungsi:

- a) Perumusan kebijakan teknis di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b) Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan Politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c) Pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e) Pelaksanaan fasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah;
- f) Pelaksanaan administrasi kesekretariatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten; dan
- g) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

1.5. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 181 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok, fungsi, tata kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan memiliki struktur organisasi sebagai berikut :



Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan
Sumber : Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 181 Tahun 2021

A. Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan dipimpin oleh Kepala Badan yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh :

1. Sekretariat, membawahi :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Program Anggaran dan Keuangan.

2. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama membawahi :

- a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub –Substansi Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama.

3. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, membawahi :

- a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub – Substansi Penanganan Konflik.

4. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan, membawahi:

- a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Politik Dalam Negeri;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub- Substansi Organisasi Kemasyarakatan.

1.6. KEPEGAWAIAN

Dalam menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan memiliki Sumber Daya Aparatur dengan jumlah

total ASN 20 orang dan Non ASN 15 orang per 31 Desember 2023. sebagaimana tergambar pada tabel-tabel berikut :

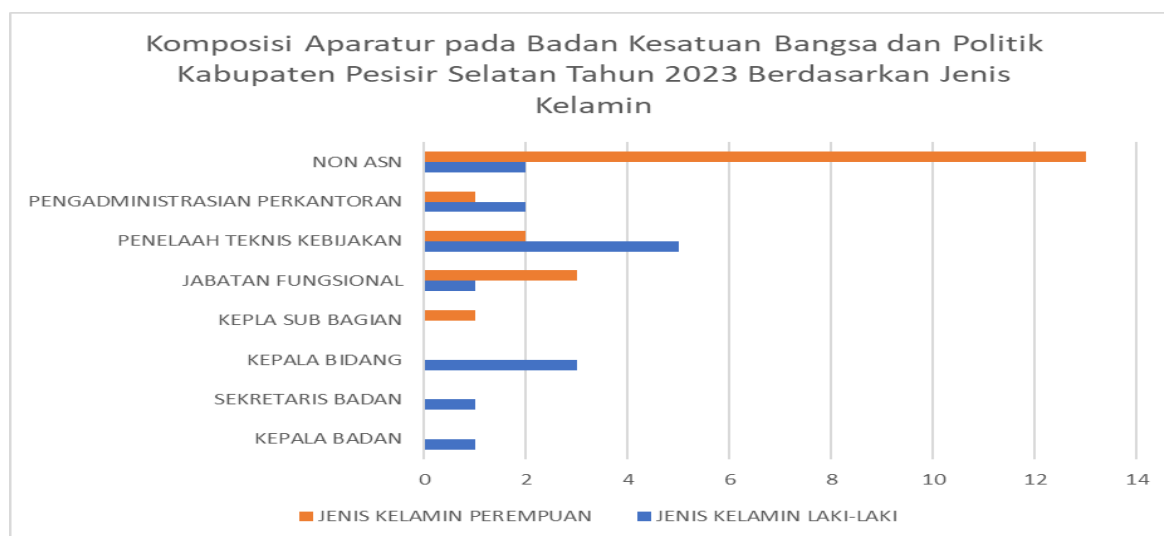
Tabel 1.6.1

**Komposisi Aparatur pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 Berdasarkan Jenis Kelamin**

No	JABATAN	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	Kepala Badan	1	-	1
2	Sekretaris Badan	1	-	1
3	Kepala Bidang	3	-	3
4	Kepala Sub Bagian	-	1	1
5	Jabatan Fungsional	1	3	4
6	Penelaah Teknis Kebijakan	5	2	7
7	Pengadministrasian Perkantoran	2	1	3
8	Non ASN	2	13	15
Total		15	20	35
% terhadap Jumlah Pegawai		42.86	57.14	100

*Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian (Kondisi Desember 2023)

Secara grafik komposisi pegawai berdasarkan jenis kelamin disajikan pada grafik 1.6.1 berikut:

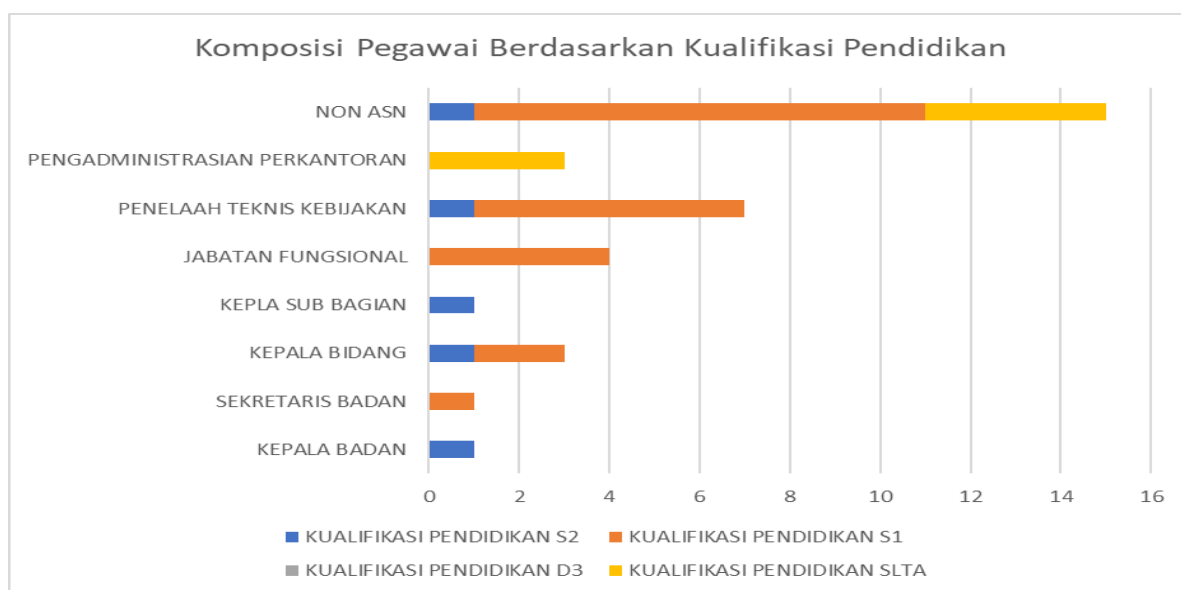


Tabel 1.6.2
Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

No	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN				JUMLAH
		S2	S1	D3	SLTA	
1	Kepala Badan	1				1
2	Sekretaris		1			1
3	Kepala Bidang	1	2			3
4	Kepala Sub Bagian	1				1
5	Jabatan Fungsional		4			4
6	Penelaah Teknis Kebijakan	1	6			7
7	Pengadministrasian Perkantoran				3	3
8	Non ASN	1	10		4	15
Total		5	23		7	35
% terhadap Jumlah Pegawai		14.29	65.71		20	100

**Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian (Kondisi Desember 2023)*

Dilihat dari segi pendidikan, komposisi Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan sudah cukup memadai untuk melaksanakan tugas dan fungsi Badan Kesbangpol yang mana 65.71% sudah berpendidikan Sarjana (Strata 1) dan 20% lagi berpendidikan SLTA sederajat. Untuk pegawai yang berpendidikan SLTA sederajat perlu adanya pengarahan untuk pengembangan karir yang lebih baik seperti diklat teknis, diklat gelar maupun diklat fungsional. Secara grafik komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dapat disajikan pada grafik 1.6.2 berikut :

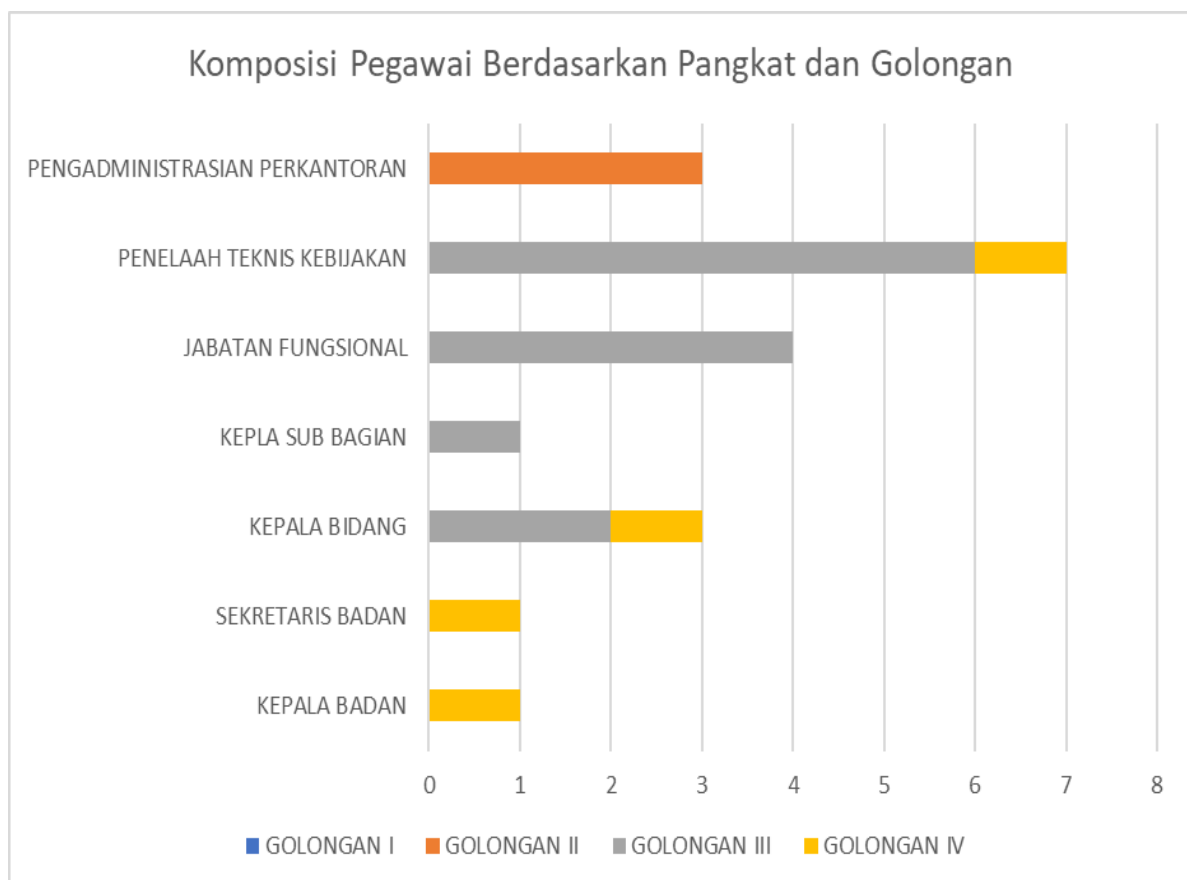


Tabel 1.6.3
Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan

NO	JABATAN	GOLONGAN				JUMLAH
		I	II	III	IV	
1	Kepala Badan	-	-	-	1	1
2	Sekretaris	-	-	-	1	1
3	Kepala Bidang	-	-	2	1	3
4	Kepala Sub Bagian	-	-	1	-	1
5	Jabatan Fungsional	-	-	4	-	4
6	Penelaah Teknis Kebijakan	-	-	6	1	7
7	Pengadministrasian Perkantoran	-	3	-	-	3
TOTAL		-	3	15	3	20
% terhadap Jumlah Pegawai		-	15	75	15	100

*Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian (Kondisi Desember 2023)

Sebagaimana diuraikan tabel diatas, tercatat 75 % Pegawai Badan Kesbangpol sudah golongan III, secara grafik komposisi pegawai berdasarkan golongan disajikan pada grafik 1.6.3 berikut ini :

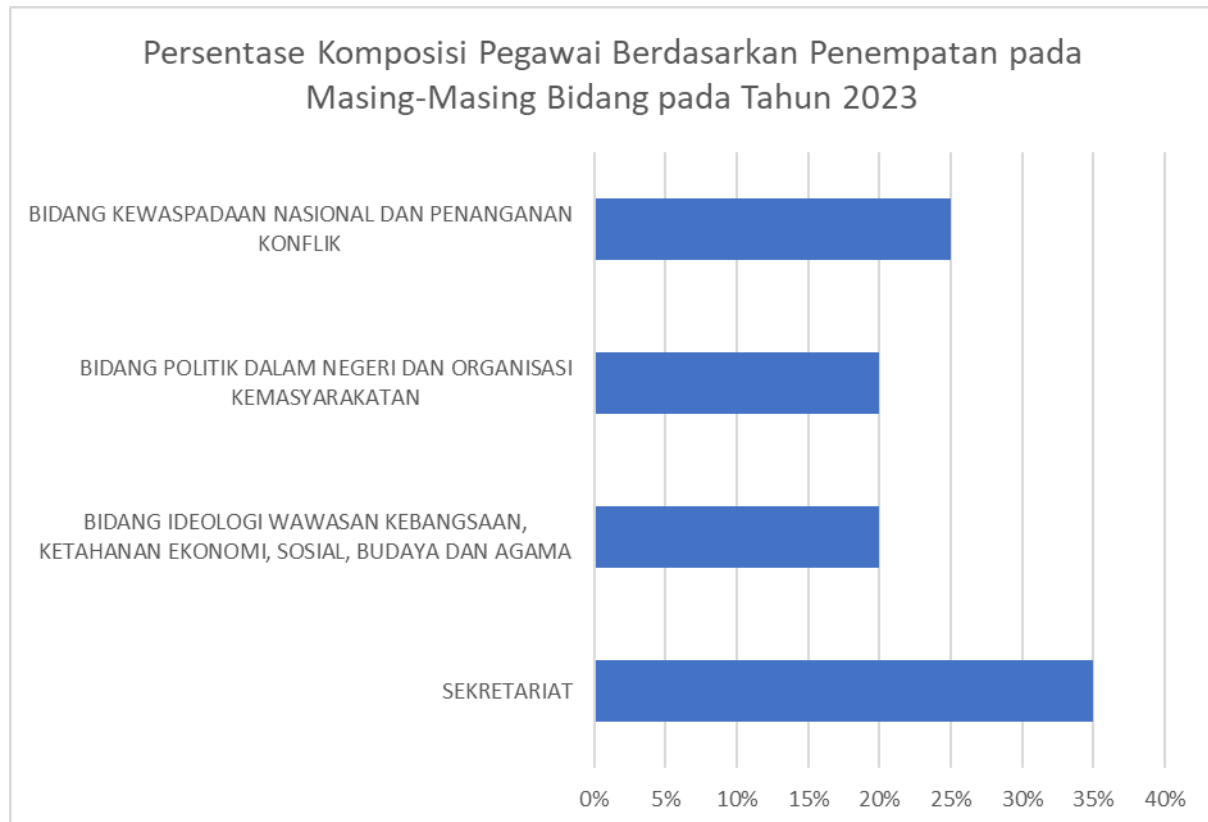


Tabel 1.6.4
Komposisi Pegawai Berdasarkan Penempatan Pada Masing Masing Bidang
Tahun 2023

No.	Bidang	Jumlah	Persentase
1.	Sekretariat	7	35 %
2.	Bidang Ideologi wawasan Kebangsaan, Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama	4	20 %
3.	Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan	4	20 %
4.	Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	5	25 %
	Jumlah	20	100 %

**Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian (Kondisi Desember 2023)*

Berdasarkan uraian tabel diatas tercatat 35 % pegawai berada di Sekretariat, sedangkan jumlah pegawai pada masing masing bidang berkisar 20 dan 25 %. secara grafik komposisi pegawai berdasarkan penempatan pada masing-masing bidang pada tahun 2023 disajikan pada grafik 1.6.4 berikut ini :



1.7. SISTEMATIKA PENULISAN

Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 menjelaskan pencapaian kinerja tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023. Metode evaluasi yang digunakan adalah metode sederhana dengan membandingkan antara target kinerja yang ditetapkan dengan realisasi kinerja. Analisa terhadap keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis adalah dengan mengurai penyebab keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dimaksud. Sedangkan analisis program/kegiatan menguraikan tentang efesiensi penggunaan anggaran yang tersedia dan menguraikan keterkaitan antara program dengan indikator kinerja dan target kinerja yang ditetapkan. Berdasarkan kerangka pikir tersebut, sistematika penyajian Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan secara ringkas tentang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan dengan rincian sebagai berikut:

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Maksud dan Tujuan
- 1.3 Dasar Hukum
- 1.4 Gambaran Umum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
- 1.5 Struktur Organisasi
- 1.6 Kepegawaian
- 1.7 Sistematika Penulisan
- 1.8 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Menjelaskan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut:

- 2.1 Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026.
- 2.2 Perjanjian Kinerja
- 2.3 Indikator Kinerja Utama

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- 3.1 Metodologi Pengukuran Capaian Kinerja
- 3.2 Hasil Pengukuran Kinerja
- 3.3 Capaian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
- 3.4 Realisasi Keuangan

BAB IV PENUTUP

- 4.1 Kesimpulan
- 4.2 Saran

LAMPIRAN

1.8 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.

Permasalahan yang terjadi dalam masyarakat yang menjadi pokok perhatian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan tugas pokok dan fungsinya antara lain:

1. Mulai melunturnya/ menurunnya jiwa bela negara dan wawasan kebangsaan pada generasi muda yang disebabkan oleh:
 - a. Derasnya arus masuk budaya asing yang kurang sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa dan Pancasila;
 - b. Terjadinya globalisasi dan digitalisasi;

- c. Munculnya bibit-bibit fanatisme dan radikalisme;
 - d. Masih belum optimalnya penyelenggaraan pendidikan ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa.
2. Masih tingginya kasus kenakalan remaja dan penyakit masyarakat yang disebabkan oleh:
 - a. Masih rendahnya pencegahan penyakit masyarakat;
 - b. Masih rendahnya pengawasan penyakit masyarakat;
 - c. Masih terbatasnya kemampuan dalam membatasi peredaran dan penyalahgunaan narkoba;
 - d. Masih belum optimalnya perlindungan terhadap perempuan dan anak.
3. Masih adanya potensi gangguan terhadap kerukunan umat beragama yang disebabkan oleh:
 - a. Masih rendahnya tingkat penyelenggaraan penguatan kerukunan umat beragama
 - b. Munculnya aliran-aliran kepercayaan baru;
 - c. Belum terbentuknya Forum Komunikasi Umat Beragama.
4. Masih banyaknya potensi konflik di tengah masyarakat yang dipicu oleh:
 - a. Belum optimalnya peran tim dan forum strategis daerah dalam mencegah dan menaggani konflik;
 - b. Belum akuratnya data potensi konflik.
5. Masih rendahnya kualitas demokrasi yang disebabkan oleh:
 - c. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemberian hak suara;
 - d. Masih rendahnya pendidikan politik masyarakat;
 - e. Masih rendahnya pengawasan terhadap partai politik;
 - f. Belum optimalnya peran ormas dan LSM dalam pembangunan.

1.9 ISU – ISU STRATEGIS

Isu-isu strategis pembangunan di bidang kesatuan bangsa dan politik Kabupaten Pesisir Selatan untuk 5 (lima) tahun ke depan, yaitu:

1. Meminimalkan terjadinya konflik.

Peningkatan upaya pencegahan dan penyelesaian konflik di tengah masyarakat baik konflik politik dalam pemilu, konflik sosial akibat kesenjangan ekonomi, konflik keagamaan akibat perbedaan paham keagamaan, konflik industrial yang berkaitan dengan upah, konflik lahan dan sumber daya alam. Selain itu juga akan diupayakan penguatan kerukunan antar umat beragama dan penganut aliran-aliran kepercayaan dalam menjaga ketahanan bangsa;

2. Memperkuat karakter kebangsaan.

Pemantapan wawasan kebangsaan, ideologi pancasila, pembauran kebangsaan, kesadaran dan kemampuan bela negara serta pembangunan karakter bagi masyarakat;

3. Optimalisasi pencegahan penyakit masyarakat dan kenakalan remaja.

Koordinasi antar Lembaga diperintah daerah, penegak hukum serta tokoh-tokoh masyarakat perlu untuk dioptimalkan guna mencegah merebaknya penyakit masyarakat dan kenakalan remaja, termasuk didalamnya pencegahan penyalahgunaan narkoba, minuman keras, tawuran, perjudian serta pelecehan seksual;

4. Meningkatkan kualitas demokrasi masyarakat.

Untuk meningkatkan kualitas demokrasi ditengah masyarakat maka perlu dilakukan optimalisasi pendidikan politik masyarakat untuk membangun etika dan moral politik serta kedewasaan perilaku berdemokrasi. Selain itu, penguatan peran partai politik dan organisasi kemasyarakatan sebagai mitra

pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan juga perlu menjadi perhatian bagi pemerintah daerah.

5. Pemantapan implementasi reformasi birokrasi.

Pemantapan implementasi reformasi birokrasi, pada hakekatnya adalah upaya untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan. Dengan meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintah, maka diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2021-2026

Penyusunan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021 – 2026 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan 2021 – 2026. Dokumen perencanaan ini secara garis besar memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan yang akan dicapai Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026. Pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang tertuang dalam RPJMD, diwujudkan dengan Tujuan dan Sasaran Strategis masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

2.1.1 VISI

Visi merupakan gambaran dan harapan masa depan yang akan diraih dalam waktu yang telah ditentukan. Visi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 adalah ***Mewujudkan Pesisir Selatan Lebih Sejahtera, Maju dan Bermartabat didukung Pemerintahan Yang Akuntabel dan Profesional***. Penjabaran Visi tersebut adalah :

Sejahtera : Mengandung makna dalam lima tahun kedepan akan terjadi semakin meningkatnya kesejahteraan masyarakat, yang diindikasikan dengan meningkatnya pendapatan perkapita penduduk yang berdampak pula pada menurunnya angka kemiskinan, serta peningkatan akses pelayanan kehidupan

masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar.

- Maju : Mengandung makna membangun daerah yang dilandasi keinginan bersama untuk mewujudkan masa depan ekonomi, sosial dan lingkungan fisik yang lebih baik, didukung sumberdaya manusia yang unggul, profesional, berperadapan tinggi, berdaya saing, berakhlak mulia serta berwawasan ke depan.
- Bermartabat : Mengandung makna kondisi kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara yang bertumpu pada nilai-nilai budi pekerti dan budaya yang luhur, mengedepankan ASBK (Adat Basandi Sarak, Sarak Basandi Kitabullah)
- Akuntabel : Mengandung makna tanggungjawab yang bersifat obyektif dan kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjelaskan kinerja atas tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.
- Profesional : Mengandung makna bahwa Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik (Partisipatif, Transparan dan Efisien) dan Bersih (bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme).

2.1.2 M I S I

Berkaitan dengan pernyataan visi pembangunan lima tahun ke depan, maka untuk **MEWUJUDKAN PESISIR SELATAN LEBIH SEJAHTERA, MAJU, DAN BERMARTABAT DIDUKUNG PEMERINTAHAN YANG AKUNTABEL DAN PROFESIONAL** dilaksanakan melalui 6 (enam) Misi yaitu :

1. Memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan.
2. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat.
3. Memperkuat kemandirian ekonomi dengan mendorong sektor potensi dan unggulan daerah.
4. Mewujudkan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai daerah tujuan wisata yang nyaman dan berkesan.
5. Mewujudkan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan sumberdaya manusia yang beriman, kreatif dan berdaya saing.
6. Mewujudkan masyarakat yang aman, tentram dan dinamis.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan mendukung misi ke-6 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yaitu ***Mewujudkan Masyarakat Yang Aman, Tentram dan Dinamis*** dengan tujuan terciptanya kondisi masyarakat Pesisir Selatan yang aman tentram dan dinamis.

2.1.3 Misi, Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah, ditetapkan tujuan dan sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut ini :

Tabel 2.1
Misi, Tujuan dan Sasaran

Misi	Tujuan	Sasaran
Misi Keenam : Mewujudkan masyarakat yang aman, tentram dan dinamis	1.Terwujudnya Reformasi Birokrasi Yang Berkinerja Tinggi	(1). Terwujudnya Pemerintahan Yang Akuntabel dan Berkinerja (2). Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah
	2.Terciptanya Kondisi Masyarakat Pesisir Selatan Yang Aman, Tentram dan Dinamis	(3).Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan dan Menjaga Lingkungan Secara Mandiri

2.2 PERJANJIAN KINERJA

Penyusunan perjanjian kinerja tahun 2023 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mengacu kepada sasaran strategis. Disini disajikan Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023. Secara garis besar perjanjian kinerja tahun 2023 meliputi 3 sasaran strategis, pengukuran pencapaian sejumlah sasaran tersebut dilakukan melalui indikator kinerja beserta targetnya, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2

Perjanjian Kinerja 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Pemerintahan Yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai AKIP Perangkat Daerah	A (81)
2.	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah	100
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Cakupan Pencegahan atau Tangkal Dini Konflik	80 %
		Cakupan Peningkatan Pendidikan Wawasan Kebangsaan dan Pendidikan Politik	30 %

Perjanjian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memiliki 3 (tiga) sasaran strategis dengan 4 (empat) indikator kinerja, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sasaran strategis I “Terwujudnya Pemerintahan Yang Akuntabel dan Berkinerja” dengan indikator kinerja “Nilai Akip Perangkat Daerah” dengan target “A (81)”.
2. Sasaran Strategis II “Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah” dengan indikator kinerja “Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah” dengan target “100”.
3. Sasaran Strategis III “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi” dengan 2 (dua) indikator kinerja, yaitu: 1) Cakupan Pencegahan atau Tangkal Dini Konflik

(target: 80%), 2) Cakupan Peningkatan Pendidikan Wawasan Kebangsaan dan Pendidikan Politik (target: 30%).

2.3. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja merupakan alat atau sarana yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran. Indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (*reliable*) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya



Tabel. 2.3
Penetapan Indikator Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 2021-2026

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULA PERHITUNGAN	SATUAN	TARGET						SUMBER DATA DAN PENANGGUNGJAWABAN
							2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1.	Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Berkinerja Tinggi	Indeks Reformasi Birokrasi	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Hasil penilaian Inspektorat Daerah	Tanpa Satuan	BB (71.8)	BB (72)	A (81)	A (81.2)	A (81.5)	A (82)	Sumber Data: Laporan LKj Penanggungjawab: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi PD	Hasil penilaian saat pengentrian kriteria inovasi pada aplikasi IGA	Tanpa Satuan	N/A	100	100	100	100	100	Sumber Data: Aplikasi IGA Penanggungjawab: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2.		Indeks Kebahagiaan Masyarakat	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dan Menjaga Lingkungan Secara Mandiri	Cakupan pencegahan atau tangkal dini konflik	$\frac{\sum \text{potensi konflik yang terdeteksi, terbahas dan tertangani dalam rakor kewaspadaan dini masyarakat (KDM)}}{\sum \text{konflik yang dilaporkan}} \times 100\%$	%	80	80	80	80	100	100	Sumber Data: Data Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik
				Cakupan Peningkatan Pendidikan wawasan kebangsaan	$\frac{\sum \text{Kelompok masyarakat yang mendapatkan Pendidikan Wawasan Kebangsaan dan Pendidikan Politik}}{\sum \text{Kelompok masyarakat Sasaran}} \times 100\%$	%	N/A	N/A	30	30	35	35	Sumber Data: Bidang Politik dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan & Bidang Ideologi



				dan Pendidikan Politik	Pendidikan Wawasan Kebangsaan dan Pendidikan Politik								Wawasan Kebangsaan Ketahanan Ekonomi Sosial Sosial Budaya dan Agama
--	--	--	--	------------------------------	---	--	--	--	--	--	--	--	---

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan dalam rangka mencapai misi pemerintah daerah secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023. Akuntabilitas kinerja ini mencakup 3 (tiga) sasaran strategis dengan 4 (empat) indikator kinerja.

3.1 METODOLOGI PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Pengukuran Kinerja yang dilakukan adalah pengukuran capaian target kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023. Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah metode pengukuran sederhana dengan membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis. Hasil pengukuran dan capaian indikator kinerja dimaksud, digunakan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan serta analisis penyebab keberhasilan/kegagalan capaian target indikator kinerja yang ditetapkan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis diukur dengan capaian kelompok indikator kinerja sasaran strategis yang berkenaan.

Ada dua jenis pengukuran capaian kinerja yang dapat digunakan yaitu :

1. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tinggi kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah, atau sebaliknya jika realisasi makin rendah pencapaian kinerja semakin baik, maka digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{(2 \times \text{Target}) - \text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Untuk penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dan keberhasilan/kegagalan capaian indikator kinerja, ditetapkan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan sebagaimana tercantum pada tabel 3.1. dibawah ini :

Tabel 3.1.1
Klasifikasi Penilaian dan Kategori Penilaian Keberhasilan/Kegagalan
Pencapaian Sasaran Strategis dan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2023

No	Klasifikasi Penilaian	Predikat
1	85% - 100%	Sangat Baik
2	69% - 84%	Baik
3	53% - 68%	Cukup
4	< 53%	Gagal

Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

3.2 HASIL PENGUKURAN KINERJA

Hasil pengukuran capaian target indikator kinerja 3 (tiga) sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada Tabel 3.2. di bawah ini.

Tabel. 3.2.1
Realisasi dan Capaian pada Sasaran Strategis

Misi/ Tujuan /Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
Misi 6 :Mewujudkan Kondisi Masyarakat Yang Aman, Tentram dan Dinamis Tujuan : Terwujudnya Reformasi Birokrasi Yang Berkinerja Tinggi					
(1).Terwujudnya Pemerintahan Yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Tanpa satuan	A (81)	*A (80.26)	99.09
(2).Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah	Tanpa satuan	100	87	87
(3). Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan dan Menjaga Lingkungan Secara Mandiri	Cakupan Pencegahan atau tangkal dini konflik	Persen	80	100	125
	Cakupan Peningkatan Pendidikan Wawasan Kebangsaan dan Pendidikan Poltik	Persen	30	40	133
Rata rata Capaian					111.10

*) Penilaian LKj Tahun 2022

Sumber : Sub Bagian Program, Anggaran dan Keuangan

Dari tabel di atas dapat dilihat ada 4 (empat) indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yaitu **(1)** Nilai AKIP Perangkat Daerah dengan target A (81) dengan realisasi tahun 2022 A (80.26) dengan tingkat capaian 99.09% **(2)**. Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah dengan target 100 dan terealisasi 87 dengan tingkat capaian 87% **(3)**. Cakupan pencegahan atau tangkal dini konflik dengan target 80% dan terealisasi 100% dengan tingkat capaian 125% **(4)**. Cakupan peningkatan Pendidikan Wawasan Kebangsaan dan pendidikan politik dengan target 30% dan teralisasi 40% dengan tingkat capaian 133%. Berdasarkan penilaian dan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dan capaian indikator kinerja berdasarkan Permendagri nomor 86 tahun 2017 maka untuk capaian indikator Nilai AKIP Perangkat Daerah dengan nilai A (80.26) atau sebesar 99.09 % dengan **predikat sangat baik**. Capaian indikator Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah dengan nilai 87 atau sebesar 87 % dengan

predikat sangat baik. Cakupan pencegahan atau tangkal dini konflik dengan realisasi 100% atau sebesar 125% dengan **predikat sangat baik.** Cakupan peningkatan Pendidikan Wawasan Kebangsaan dan pendidikan politik dengan realisasi 40% atau sebesar 133% dengan **predikat sangat baik.** Rata rata capaian kinerja 4 (empat) indikator kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2023 adalah **111.10** dengan **predikat sangat baik.**

3.3 CAPAIAN KINERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Pada tahun 2023 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melaksanakan Misi 1 dan Misi 6 dengan 3 (tiga) sasaran dan 4 (empat) indikator. Untuk lebih jelasnya berikut disampaikan capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2023.

1. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Sasaran 1: Terwujudnya Pemerintahan Yang Akuntabel dan Berkinerja

Tabel. 3.3.1
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1

No	Indikator Kinerja	Satuan	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1.	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Tanpa Satuan	A (81)	*A (80.26)	99.09
Rata- Rata Capaian					99.09

Sumber : Nilai AKIP tahun 2022 Subbag Program, Anggaran dan Keuangan Tahun 2023

Sasaran strategis (1) **Terwujudnya Pemerintahan Yang Akuntabel dan Berkinerja** merupakan tahapan yang dilakukan untuk mewujudkan reformasi birokrasi di setiap organisasi pemerintah dan bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sasaran **Terwujudnya Pemerintahan Yang Akuntabel dan Berkinerja** adalah dalam rangka pencapaian tujuan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik. Tata kelola pemerintahan yang baik mengandung prinsip efektif dan efisien terhadap pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis meningkatnya tata kelola organisasi ini ditetapkan indikator kinerja (1) **Nilai AKIP Perangkat Daerah** yang mana adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kabupaten Pesisir Selatan. Dari tabel 3.3.1 dapat dilihat target indikator kinerja nilai evaluasi akuntabilitas kinerja adalah A (81) dengan realisasi A (80.26) maka tingkat capaiannya **99.09%**. Dengan demikian, capaian indikator kinerja ini termasuk kategori kinerja “**sangat baik**”. Keberhasilan sasaran 1 didukung oleh 1 Program dengan 6 (enam) Kegiatan dengan 17 (tujuh belas) sub kegiatan yaitu :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah; dan
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas AS
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor;
 - b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - d. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;
 - e. Fasilitas Kunjungan Tamu; dan
 - f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah:
 - a. Pengadaan Mebel
 - b. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik; dan
 - b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

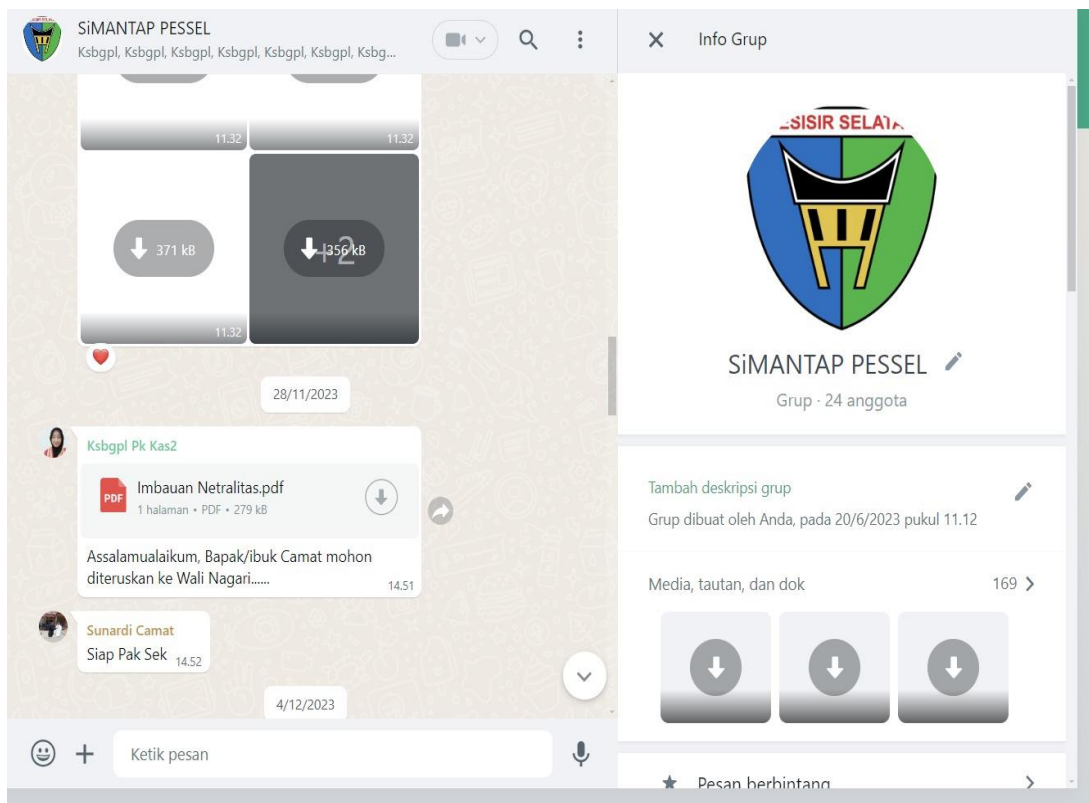
- b. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan.
- c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Inovasi Perangkat Daerah**Tabel. 3.3.2****Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2**

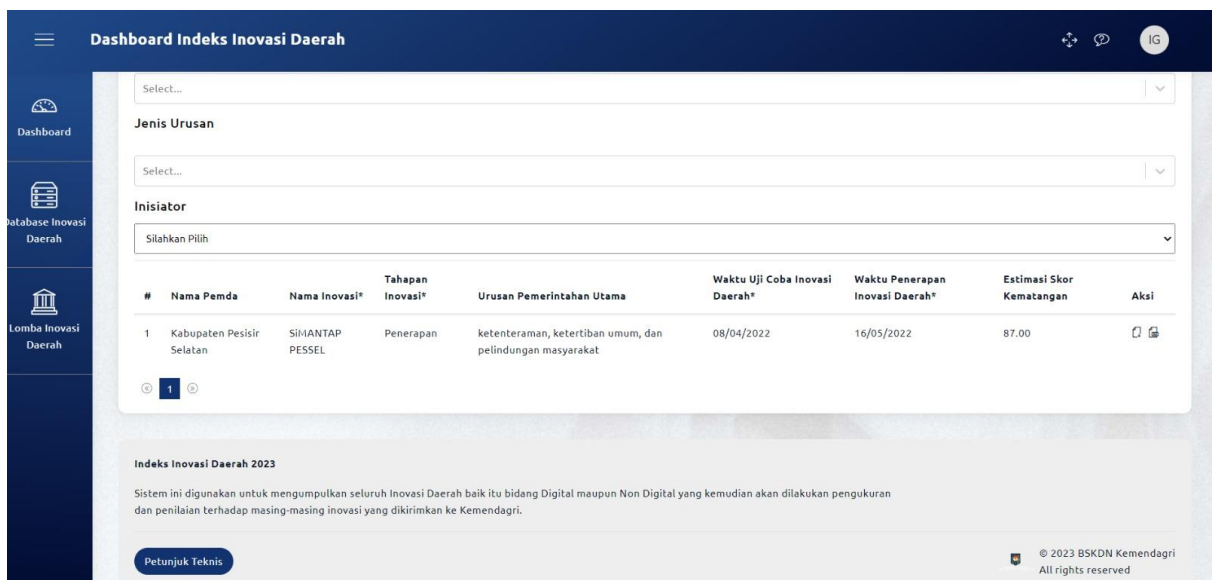
No	Indikator Kinerja	Satuan	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1.	Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah	Tanpa Satuan	100	87	87
Rata- Rata Capaian (%)					87

Sumber : Subbag Program, Anggaran dan Keuangan Tahun 2023

Sasaran strategis (2) Meningkatnya Kualitas Inovasi Perangkat Daerah dengan indikator kinerja Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah target 100 dan terealisasi 87 pada aplikasi IGA maka tingkat capaian 87%. Dengan demikian, capaian indikator kinerja ini termasuk kategori kinerja “**sangat baik**”. Inovasi **Sistem Informasi Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Kabupaten Pesisir Selatan (SiMANTAP PESSEL)** yang merupakan inovasi lanjutan dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang mana pada tahun 2022 belum terlaksana karena dalam tahap rancangan. **Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah** merupakan tingkat kematangan inovasi yang menunjukkan seberapa efektifnya upaya inovasi tersebut pada suatu perangkat daerah. SiMANTAP ini merupakan suatu wadah yang dilaksanakan oleh Badan Kesbangpol untuk menampung informasi/pengaduan tentang permasalahan/ konflik sosial yang terjadi di masyarakat yang ada dalam wilayah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk menampung permasalahan tersebut dibuatlah suatu WA Grup yang beranggotakan seluruh Camat dan Wali Nagari. Hal ini bertujuan untuk mempercepat informasi sampai ke level pimpinan, agar dapat menentukan tindakan apa yang harus dilakukan. Beberapa dokumentasi dari Inovasi SiMANTAP PESSEL berikut ini :



Wag SIMANTAP PESSEL



Nilai kematangan Inovasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada aplikasi IGA

Sasaran 3: Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dan Menjaga Lingkungan Secara Mandiri

Tabel. 3.3.3
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3

No.	Indikator Kinerja	Satuan	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1.	1. Cakupan Pencegahan atau Tangkal Dini Konflik	Persen	80	100	125
	2. Cakupan Peningkatan Pendidikan Wawasan Kebangsaan dan Pendidikan Politik	Persen	30	40	133
Rata-rata Capaian (%)					191.5

Sumber : Subbag Program, Anggaran dan Keuangan Tahun 2023

Dari tabel 3.3.3 di atas dapat di lihat rata-rata capaian indikator kinerja sasaran 3 sebesar 191.5%. Dengan demikian, capaian indikator kinerja ini termasuk kategori kinerja “**sangat baik**”. Berdasarkan tabel diatas, tingginya realisasi dari target dengan indikator kinerja sebagai berikut:

(1) Cakupan Pencegahan atau Tangkal Dini Konflik

Untuk indikator kinerja “Cakupan Pencegahan atau Tangkal Dini Konflik” digunakan perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\sum \text{potensi konflik yang terdeteksi, terbahas dan tertangani dalam rakor kewaspadaan dini masyarakat (KDM)}}{\sum \text{konflik yang dilaporkan}} \times 100\%$$

Cakupan pencegahan atau Tangkal Dini Konflik di dukung oleh Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial pada sub kegiatan Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota.

Secara nasional pembangunan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik diarahkan untuk memelihara dan mempertahankan kedaulatan dan keutuhan bangsa, membangun dan memelihara kondisi keamanan dan ketertiban umum masyarakat serta meningkatkan dukungan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat melalui berbagai program dan kegiatan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan tertib serta antisipatif terhadap munculnya kerawanan konflik sosial, politik serta bencana yang dapat meresahkan masyarakat. Masalah keamanan merupakan kebutuhan semua pihak, sehingga kewaspadaan dini perlu dilakukan oleh rakyat Indonesia pada umumnya dan masyarakat Pesisir Selatan khususnya. Pentingnya kewaspadaan keamanan diantisipasi secara dini dengan penuh kepekaan dan kesiapsiagaan karena benturan kepentingan ekonomi, politik, sosial, agama, etnis dan ideologi setiap saat bisa muncul. Mencermati perkembangan situasi dan kondisi secara paten global secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi situasi dan kondisi di daerah khususnya wilayah Kabupaten Pesisir Selatan. Potensi konflik yang terjadi di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan antara lain konflik agraria dan SDA, sosial ekonomi dan budaya. Berdasarkan hasil laporan dari Bidang Kewaspadaan dan Penanganan Konflik Sosial Jumlah konflik yang ditangani selama tahun 2023 sebanyak 12 konflik yang telah difasilitasi.

Jumlah konflik yang ditangani dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 dapat dilihat pada grafik di bawah ini:



Tingginya jumlah konflik yang terjadi dapat disebabkan oleh beberapa faktor yaitu:

1. Adanya ketidakpuasan dan perbedaan kepentingan (ekonomi, politik, sosial, agama, etnis dan ideologi) yang mengakibatkan perseteruan atau benturan antar masyarakat.
2. Sulitnya memetakan potensi konflik secara rinci pada masing-masing kecamatan karena kondisi masyarakat yang dinamis.
3. Rasa ketidakadilan yang dinilai berat sebelah.
4. Pergeseran tata nilai dan tata laku sosial budaya masyarakat.
5. Keterbatasan dan minimnya informasi yang diperoleh dari masyarakat yang berkaitan dengan pendeteksian dan pencegahan dini.

Berikut ini adalah beberapa dokumentasi konflik yang telah difasilitasi oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023:

- a. Permasalahan tentang peribadatan Umat Nasrani yang dilakukan oleh Suku Nias di PT. SJAL POM Silaut



Sumber : Dokumentasi Kegiatan Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik

- b. Perselisihan dan pertikaian di Kerapatan Adat Nagari di Nagari Pungasan Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan



Sumber : Dokumentasi Kegiatan Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik

(2) Cakupan Peningkatan Pendidikan Wawasan Kebangsaan dan Pendidikan Politik

Untuk indikator kinerja “Cakupan Peningkatan Pendidikan Wawasan Kebangsaan dan Pendidikan Politik” digunakan perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\sum \text{Kelompok masyarakat yang mendapatkan Pendidikan Wawasan Kebangsaan dan Pendidikan Politik}}{\sum \text{Kelompok masyarakat Sasaran Pendidikan Wawasan Kebangsaan dan Pendidikan Politik}} \times 100\%$$

Cakupan peningkatan Pendidikan wawasan kebangsaan dan Pendidikan politik didukung oleh Program Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan, Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik dan Program pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan. Dan Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya.

Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi peningkatan cakupan pendidikan Wawasan Kebangsaan dan Pendidikan Politik adalah:

1. Pendidikan

Dalam sistem pendidikan, kita belajar tentang sejarah bangsa, nilai-nilai budaya, dan pentingnya persatuan. Di sekolah, kita diajarkan untuk menghargai keragaman dan pluralitas yang ada dalam masyarakat kita.

2. Sejarah Bangsa

Sejarah adalah cermin dari identitas bangsa. Melalui pemahaman yang mendalam tentang sejarah bangsa kita, kita dapat mengenali akar-akar perjuangan dan pencapaian yang telah membentuk kita menjadi apa yang kita adalah saat ini. Sejarah bangsa adalah kisah tentang perjuangan, penderitaan, dan kebangkitan yang telah membentuk karakter bangsa kita

3. Budaya dan Identitas

Kebudayaan adalah salah satu elemen yang paling kuat dalam membentuk Wawasan Kebangsaan. Budaya mencakup bahasa, adat istiadat, seni, dan nilai-nilai yang kita warisi dari generasi sebelumnya. Memahami dan merayakan budaya kita adalah cara untuk menghargai kekayaan warisan yang kita miliki sebagai bangsa.

4. Peran Pemerintah

Pemerintah memainkan peran penting dalam membentuk Wawasan Kebangsaan melalui kebijakan dan program-program pendidikan. Pemerintah juga memiliki tanggung jawab untuk mempromosikan nilai-nilai kebangsaan yang positif dan mendukung kerja sama antar warga negara. Kebijakan yang bijaksana dan pemimpin yang visioner dapat memperkuat ikatan antara pemerintah dan rakyat, menciptakan kebanggaan nasional, dan mendorong persatuan

Dokumentasi beberapa Hari Besar Nasional dan kegiatan Wawasan Kebangsaan lainnya yang telah diakomodir oleh Badan Kestuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023:

a. Upacara Hari Besar Nasional





Sumber : Dokumentasi Kegiatan Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Agama

b. Gerakan Nasional Pembagian 10 Juta Bendera Merah Putih



Sumber : Dokumentasi Kegiatan Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Agama

Dalam pencapaian indikator ini dimana telah terlaksananya penyaluran hibah keuangan untuk 13 (tiga belas) partai politik. Pendidikan politik dilaksanakan oleh partai politik untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya anggota partai politik. Salah satu faktor pendukung tingginya realisasi pada sasaran ini adalah adanya

peningkatan jumlah ormas yang mendaftar sesuai dengan regulasi dari tahun 2021 - 2023, dapat dilihat dari grafik di bawah ini:



Beberapa dokumentasi kegiatan pada Bidang Politik Dalam Negeri dan Ormas dan pendidikan politik yang dilakukan oleh Partai Politik tahun 2023:

a. Pendidikan Politik yang dilakukan oleh Partai Politik

Partai Demokrat





Partai Bulan Bintang (PBB)



Partai Golongan Karya (Golkar)





Partai Amanat Nasional (PAN)



Partai Perindo (Perindo)



Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)



Partai Hati Nurani Rakyat



Sumber : Dokumentasi Kegiatan Bidang Politik dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan

b. Ormas yang Terdaftar, Sesuai dengan Regulasi dan Kegiatan Ormas Lainnya



Sumber : Dokumentasi Kegiatan Bidang Politik dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Tabel. 3.3.2.1

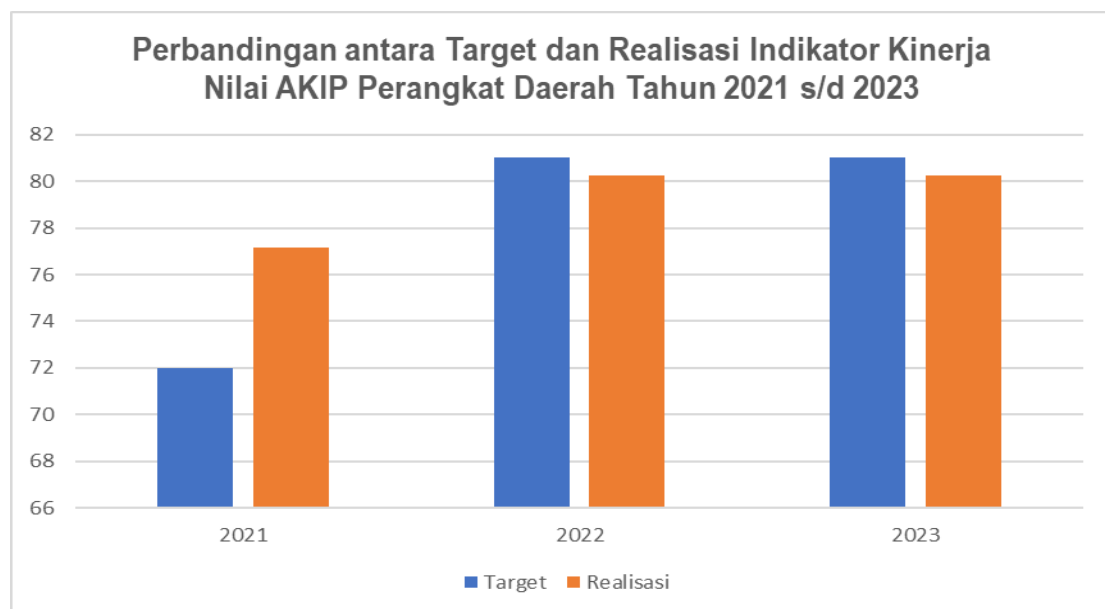
Realisasi dan Capaian pada sasaran I

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi			Capaian (%)		
		2021	2022	2023	2021	2022	2023
Terwujudnya Pemerintahan Yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai AKIP Perangkat Daerah	77.14	80.26	*80.26	107.13	99.09	99.09

*) Penilaian LKj Tahun 2022

Sumber : Subbag Program, Anggaran dan Keuangan

Secara grafik perbandingan antara target dan realisasi indikator kinerja Nilai AKIP Perangkat Daerah Tahun 2021 s/d 2023 disajikan pada grafik di bawah ini :



Sumber : Subbag Program, Anggaran dan Keuangan

Sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, pelaksanaan akuntabilitas kinerja diharuskan bagi setiap instansi pemerintah. Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai visi dan misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara revidi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dijelaskan lebih lanjut tentang laporan Kinerja yang merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Laporan kinerja tersebut selanjutnya dievaluasi oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dari tahun 2021 dengan nilai **77.14 (BB)** dengan predikat **“sangat baik”** mengalami kenaikan menjadi **80.26 (A)** di tahun 2022 dengan predikat **“memuaskan”** hal ini menunjukkan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan yang berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai level eselon 4/pengawas/subkoordinator. Evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dilaksanakan terhadap 4 (empat) komponen dasar manajemen kinerja yaitu (1) perencanaan kinerja (2) pengukuran kinerja (3) pelaporan kinerja (4) evaluasi akuntabilitas kinerja internal. Untuk Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023 pada tabel 3.3.3.1 realisasi dan capaian masih merujuk pada penilaian LKj tahun 2022.

Tabel. 3.3.2.2
Realisasi dan Capaian pada sasaran II

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi			Capaian (%)		
		2021	2022	2023	2021	2022	2023
Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi PD	-	87	*87	0	87	*87

*) Penilaian Inovasi Tahun 2022 pada aplikasi Innovative Government Award (IGA)

Sumber : Subbag Program, Anggaran dan Keuangan

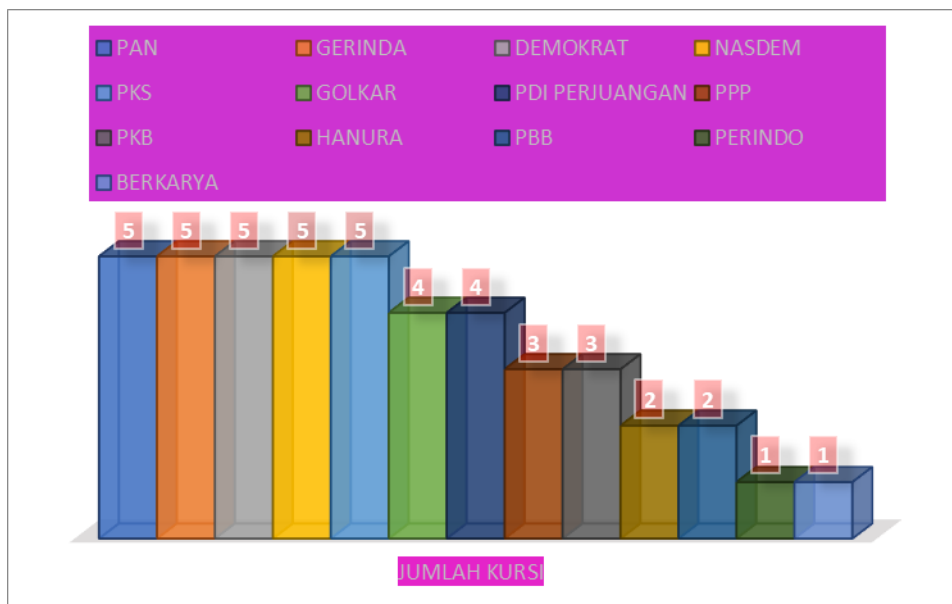
Dari tabel di atas, di tahun 2021 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan masa peralihan dari bagian pada Sekretariat Daerah menjadi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sehingga untuk inovasi masih belum ada dan belum terlaksana. Pelaksanaan inovasi mulai terlaksana di tahun 2022 dengan tingkat kematangan inovasi 87. Untuk Nilai kematangan Inovasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023 pada tabel 3.3.3.2 realisasi dan capaian masih merujuk pada penilaian inovasi tahun 2022 pada aplikasi Innovative Government Award (IGA).

Tabel. 3.3.2.3
Realisasi dan Capaian pada sasaran III

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi			Capaian (%)		
		2021	2022	2023	2021	2022	2023
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan dan Menjaga Lingkungan Secara Mandiri	(1)Cakupan Pencegahan atau tangkal dini Konflik	-	-	100	-	-	125
	(2)Cakupan Peningkatan pendidikan wawasan kebangsaan dan pendidikan politik	-	-	40	-	-	133

Sumber : Subbag Program, Anggaran dan Keuangan

Dari tabel 3.3.2.3 diatas dapat dilihat bahwa untuk kedua indikator kami tidak bisa membandingkan dengan tahun sebelumnya. Untuk indikator kinerja (1) cakupan pencegahan atau tangkal dini konflik tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya, karena adanya perubahan satuan terhadap perjanjian kinerja dari yang sebelumnya jumlah konflik yang terfasilitasi dengan satuan rekomendasi **menjadi** cakupan pencegahan atau tangkal dini konflik dengan satuan persentase, sedangkan untuk indikator kinerja dari (2) persentase pemilu aman, jujur dan adil menjadi cakupan pendidikan wawasan kebangsaan dan pendidikan politik sehingga terjadi perubahan formulasi. Beberapa data penunjang yang ditampilkan sebagai berikut :



Sumber Data Bidang Politik dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan



Sumber Data Bidang Politik dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan

Untuk meningkatkan kualitas demokrasi ditengah masyarakat maka perlu dilakukan optimalisasi pendidikan politik masyarakat untuk membangun etika dan moral politik serta kedewasaan perilaku demokrasi. Selain itu penguatan peran partai politik dan organisasi kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan juga perlu menjadi perhatian bagi pemerintah daerah.

3. Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis (Renstra).

Dalam penetapan target pada Renstra dan Perjanjian Kinerja, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik beserta Tim Bapadalitbang menyepakati target yang akan dicapai oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan mempedomani Rasionalisasi RPJMD, Renstra dan target capaian tahun sebelumnya, maka didapatkan target rasionalisasi Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik seperti tabel A.3 di bawah ini:

Tabel. A.3
Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2023 dengan Target pada Renstra

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Target Kinerja Tahun 2023 pada Renstra	Keterangan
Sasaran I : Terwujudnya Pemerintahan Yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai AKIP Perangkat Daerah	*A (80.26)	A (81)	* Merupakan Nilai AKIP 2022 Untuk Nilai AKIP 2023 masih dalam proses
Sasaran II : Meningkatnya kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah	87	100	
Sasaran III : Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan menjaga lingkungan secara mandiri	1.Cakupan Pencegahan atau tangkal dini konflik 2. Cakupan peningkatan pendidikan wawasan kebangsaan dan pendidikan politik	100 40 %	80 30 %	

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa realisasi kinerja pada sasaran I dengan indikator kinerja **Nilai AKIP Perangkat Daerah** belum mencapai target angka walaupun sudah tercapai nilai peringkat “A” pada renstra tahun 2022, nilai AKIP yang disajikan merupakan nilai AKIP tahun 2022 karena nilai AKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2023 belum bisa kami sampaikan karena nilai LKj baru bisa didapat sekitar bulan Maret setelah laporan ini kami sampaikan ke Inspektorat Daerah. Untuk sasaran II dengan indikator kinerja **Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah**

dengan tingkat kematangan yang diperoleh 87 dari yang targetkan di tahun 2023 sebesar 100 tidak dapat tercapai, karena ada beberapa bahan yang diupload pada aplikasi IGA masih belum lengkap. Realisasi kinerja pada sasaran III dengan 2 (dua) indikator **(1) Cakupan pencegahan atau tangkal dini konflik** dengan target 80 % dan realisasi 100 % hal ini merujuk pada konflik yang terjadi selama tahun 2023 sebanyak 12 konflik dapat difasilitasi dengan baik oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik **(2) Cakupan peningkatan pendidikan wawasan kebangsaan dan pendidikan politik** dengan target Renstra 30 % terealisasi sebesar 40 %, dalam hal ini Badan Kesatuan Bangsa Politik melakukan koordinasi dengan 13 partai politik yang menerima dana hibah bantuan keuangan untuk melakukan pendidikan politik bagi kader partai dan masyarakat.

a. Nilai AKIP Perangkat Daerah

Berdasarkan kajian rasionalisasi target IKU RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan 2021-2026 maka target tahun 2023, penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah 72 (BB). Nilai AKIP Badan Kesatuan Bangsa dan politik Pesisir Selatan Tahun 2023 masih dalam proses evaluasi oleh inspektorat, maka berdasarkan hasil AKIP tahun 2022 nilai AKIP Badan Kesatuan Bangsa adalah 80,26 (A) artinya nilai ini akan mendakati target rasionalisasi RPJMD yaitu 81 (A).

b. Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah

Adanya pemberlakuan penyesuaian skor target dengan indikator juknis yang dikeluarkan oleh Badan Strategi Kebijakan dalam Negeri Kemendagri, maka terjadi perubahan skor range nilai Indeks Inovasi Daerah menjadi 0 – 100. Range kategori inovasi adalah sebagai berikut:

- 0 dengan kategori tidak inovatif.
- 0,01 – 34,99 kurang inovatif.

- 35,00 – 60,00 inovatif
- 60,01 – 100 sangat inovatif

Berdasarkan range tersebut Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan nilai kematangan inovasi daerah 87 masuk pada range sangat inovatif. Berdasarkan hasil kajian rasionalisasi target IKU RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan target Indeks Inovasi Daerah (IID) tahun 2023 adalah 62,32 maka untuk IID Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2023 dengan realisasi skor 87.

c. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dan Menjaga Lingkungan Secara Mandiri

Indikator ini tidak termasuk dalam rasionalisasi target IKU RPJMD 2021-2026 Kabupaten Pesisir Selatan. Hal ini dikarenakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang terbentuk tahun 2021 yang sebelumnya merupakan bagian dari Sekretariat Daerah sehingga tidak masuk dalam IKU RPJMD 2021 – 2026 Kabupaten Pesisir Selatan. RPJMD tersusun sebelum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terbentuk.

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negeri dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penilaian terhadap Sistem akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah terbagi atas 7 kategori yaitu AA (>90-100), A (>80-90), BB (>70-80), B (>60-70), CC (>50-60), C (>30-50), dan D (>0-30) sebagaimana disajikan pada tabel berikut :

No.	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1.	AA	>90-100	Sangat Memuaskan
2.	A	>80-90	Memuaskan , Memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel

3.	BB	>70-80	Sangat Baik , Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja andal
4.	B	>60-70	Baik , Akuntabilitas kinerja sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan
5.	CC	>50-60	Cukup (Memadai) , kuantabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar
6.	C	>30-50	Kurang , Sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar
7.	D	>0-30	Sangat Kurang , Sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja, perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar

Jika dibandingkan dengan standar nasional, nilai evaluasi laporan akuntabilitas kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2022 memperoleh nilai A (>80-90). Dengan kata lain, nilai evaluasi akuntabilitas kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat dikategorikan **memuaskan** artinya memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel.

5. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah dilakukan

Tabel. A.5
Realisasi dan Capaian pada Sasaran Strategis

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
Sasaran I : Terwujudnya Pemerintahan Yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Tanpa satuan	A (81)	A (80.26)	99.09
Sasaran II : Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi	Tanpa satuan	100	87	87

Sasaran III : Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan dan Menjaga Lingkungan Secara Mandiri	(1) Cakupan Pencegahan atau Tangkal Dini Konflik	persentase	80	100	125
	(2) Cakupan peningkatan pendidikan Wawasan Kebangsaan dan Pendidikan Politik	persentase	30	40	133
Rata – rata capaian (%)					111.10

Sasaran strategis yang belum memenuhi target indikator kinerja adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja

Untuk meningkatkan indikator kinerja pada sasaran strategis I, berdasarkan rekomendasi Laporan Hasil Evaluasi yang dikeluarkan oleh Inspektorat, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Perlu melakukan beberapa hal sebagai berikut:

a. Perencanaan Kinerja

- Agar aktivitas yang dilaksanakan mendukung kinerja yang ingin dicapai dipantau, dilakukan perbaikan untuk capaian kinerja yang lebih baik.
- Agar setiap pegawai memahami dan peduli atas pengukuran kinerja.

b. Pengukuran Kinerja

- Agar capaian kinerja tahun sebelumnya di muat dalam capaian kinerja sebagai perbandingan dengan tahun berjalan.
- Agar Efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja dilaksanakan terhadap seluruh indikator kinerja.

c. Pelaporan Kinerja

- Dokumen Laporan Kinerja agar menginformasikan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi tahun-tahun sebelumnya.
- Dokumen Laporan Kinerja agar menginformasikan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi kinerja nasional/internasional (Benchmark Kinerja).

d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

- Agar Pemantauan Capaian kinerja dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai.
- Agar membuat SOP Pemantauan Capaian Kinerja Internal.
- Agar hasil dari evaluasi akuntabilitas kinerja dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efesiensi kinerja.

Dari rekomendasi atas evaluasi laporan kinerja tersebut sudah ditindaklanjuti, dengan penjelasan sebagai berikut:

- Memperbaiki rumusan tujuan/sasaran strategis beserta indikatornya di level Pemda maupun PD agar berorientasi pada hasil dan memastikan kecukupannya dalam mengukur keberhasilan tujuan/sasaran strategis tersebut, dengan eviden seperti di bawah ini:



PEMERINTAH KABUPATEN PESIR SELATAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
JALAN ROHANA KUDUS – PAINAN; EMAIL: kesbangpolkabpessel7@gmail.com

BERITA ACARA

RASIONALISASI RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PESIR SELATAN TAHUN 2021-2026
Nomor : 130/ II 6 /BKPol-PS/2023

Pada hari ini, tanggal enam belas, bulan Januari, tahun dua ribu dua puluh tiga, kami Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan hasil Rasionalisasi Target Indikator Kinerja Utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 telah melakukan rasionalisasi target Capaian Kinerja Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026 pada BAB IV tentang target kinerja sebagai berikut :

1. Eselon II

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Tanpa Satuan	N/A	N/A	65 (B)	65 (B)	65 (B)	65 (B)
		Nilai AKIP Perangkat Daerah	Tanpa Satuan	BB (71.8)	BB (72)	A (81)	A (81.2)	A (81.5)	A (82)
2.	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi PD	Tanpa Satuan	N/A	100	100	100	100	100
3.	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dan Menjaga Lingkungan Secara Mandiri	Cakupan pencegahan atau tangkal dini konflik	%	80	80	80	80	100	100
		Cakupan Peningkatan Pendidikan wawasan kebangsaan dan Pendidikan Politik	%	N/A	N/A	30	30	35	35

2. Eselon III

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatnya Nilai Evaluasi Sakip Badan Kesbangpol	Nilai Komponen Perencanaan pada evaluasi SAKIP Badan Kesbangpol	Tanpa Satuan	BB (71.8)	BB (72)	A (81)	A (81.2)	A (81.5)	A (82)
2.	Meningkatnya Pelayanan Umum dan Kepegawaian Badan Kesbangpol	Tingkat Kepuasan Terhadap Layanan Kepegawaian	Tanpa Satuan	Memuaskan	Memuaskan	Memuaskan	Sangat Puas	Sangat Puas	Sangat Puas
3.	Meningkatnya Inovasi	Jumlah Inovasi Per Bidang (1)	Inovasi	N/A	1	3	3	3	3
4.	Meningkatkan Peran Forum Strategis Daerah dalam Pencegahan dan Penanganan Konflik	Persentase Rekomendasi Penanganan Konflik yang ditindak Lanjuti	%	80	80	80	80	100	100
5.	Meningkatnya Fasilitasi tentang Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa	Jumlah Penyelenggaraan Pendidikan Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa	Kali	N/A	2	2	3	4	5
6.	Menurunnya Penyakit Masyarakat	Persentase Penurunan Kasus Penyalahgunaan Narkoba	%	N/A	3	2	2	1	1
		Persentase Penurunan Kasus Kenakalan Remaja	%	N/A	N/A	3	2	1	1
7.	Meningkatnya Peran Lembaga Politik/Ormas untuk Kesejahteraan Masyarakat	Persentase Aspirasi Masyarakat yang diterima dari Perwakilan Partai Politik	%	N/A	N/A	55	60	60	65

3. Escalon IV

TAHUN KE					TARGET KINERJA SARASAN PADA					
NO	SARASAN STRATEGIS	INDIKATOR SARASAN	SATUAN	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1.	Tertumahnya Dokumen Perangkat Daerah tepat waktu	Jumlah Dokumen Perencanaan Anggaran Perangkat Daerah yang disusun Tepat Waktu	Dokumen	3 (Rencana, RKA, Perubahan, RKA)	3 (Rencana, RKA, Perubahan, RKA)	3 (Rencana, RKA, Perubahan, RKA)	3 (Rencana, RKA, Perubahan, RKA)	3 (Rencana, RKA, Perubahan, RKA)	3 (Rencana, RKA, Perubahan, RKA)	
2.	Meningkatnya Kualitas Data Kinerja Badan kesbangpol	Jumlah Dokumen Data Sektoral yang dikelola	Dokumen	N/A	3	3	4	4	5	
3.	Meningkatnya Layanan Kepegawaian	Persentase Kepegawaian Tepat Waktu	%	100	100	100	100	100	100	
4.	Meningkatnya Kualitas Layanan Surat Menyurat	Persentase Layanan Surat Menyurat Sesuai SOP	%	100	100	100	100	100	100	
5.	Meningkatnya SDM Kesbangpol	Jumlah Pelatihan Karyawan Sendiri	Kali	N/A	N/A	1	1	1	1	
6.	Informasi Kesamaan Ketransmuran dan Ketreruban Masyarakat	Jumlah Data Konflik	Konflik	5	10	10	10	10	10	
7.	Meningkatnya Masyarakat yang Mengikuti Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa	Jumlah Masyarakat yang Mengikuti Penyelenggaraan Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa	Orang	N/A	500	500	500	500	500	
8.	Meningkatkan Fasilitas Pencegahan dan Pengawasan PEKAT	Jumlah Penyelenggaraan Pencegahan Pekat	Kali	N/A	1	2	2	3	3	
		Jumlah Penyelenggaraan Pengawasan Pekat	Kali	N/A	1	1	1	1	1	
9.	Meningkatkan Efektivitas Kelembagaan	Persentase Lembaga Politik (Partai/Ormas)	%	80	80	80	80	85	85	

Demokrasi	yang sesuai dengan Regulasi							
-----------	-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Dan juga pada BAB VII tentang Cascading Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026.

Demikian berita acara ini dibuat dan disepakati untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Painan, 16 Januari 2023
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Pesisir Selatan

HARDI DARMA PUTRA, S.H., M.Si.
NIP.1996709011986021001

Diketahui

Kepala Badan Perencanaan Daerah, Penelitian
dan Pengembangan
Kabupaten Pesisir Selatan

HADI SUSILO, SSTP., M.Si
NIP. 19770522 199703 1 001

Inspektur Daerah

INSPEKTORAT DAERAH
Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan

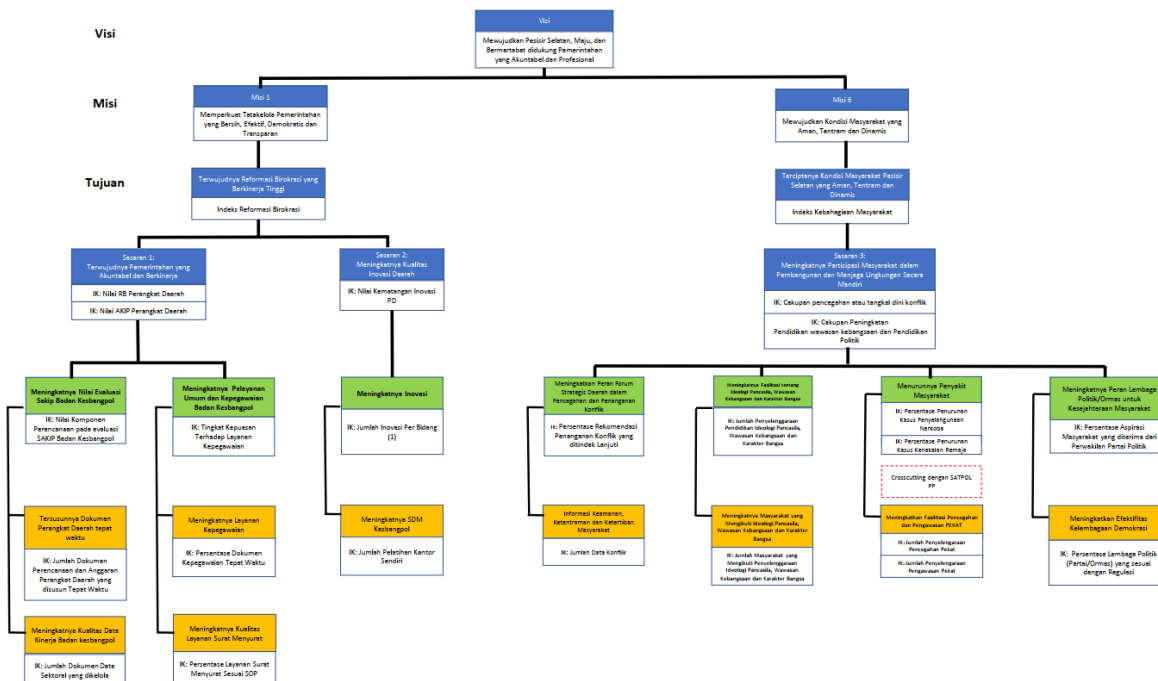
PRUSDYANTO, S.H., M.Hum
NIP. 1962031121902031008

Sekretaris Daerah
Kabupaten Bessir Selatan

SETDA

MAWARDI ROSKA, S.I.P.
NIP. 19670907 198002 1 00

- b. Melakukan review kinerja prioritas pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan agar indikator keberhasilan yang ada di perjanjian kinerja sesuai pada levelnya.
- c. Mereview kembali dokumen penjenjangan kinerja (cascade down) dengan mengacu pada permenPANRB No. 89 tahun 2021 tentang penjenjangan kinerja instansi pemerintah, dengan eviden sebagai berikut:



- d. Menyusun pedoman SAKIP Kabupaten Pesisir Selatan dengan memastikan minimal aspek perencanaan, pengumpulan dan pengukuran data kinerja serta evaluasi internal secara komprehensif.
- e. Melakukan review kembali target yang di perjanjikan agar selaras dengan hasil capaian tahun sebelumnya dan menggambarkan kinerja yang lebih tinggi.
- f. Menerapkan kebijakan reward and punishment dengan capaian kinerja organisasi.
- g. Memanfaatkan aplikasi e-SAKIP sebagai alat untuk monitoring pencapaian kinerja Bupati dan setiap perangkat Daerah sekaligus dapat diintegrasikan dengan sistem manajemen kinerja lainnya.
- h. Menjadikan laporan kinerja sebagai bahan evaluasi dalam perbaikan dokumen perencanaan selanjutnya.

2. Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah

Kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran terdapat pada indikator kinerja Nilai Kematangan Inovasi hal ini dikarenakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik masih kurang lengkap dalam mengupload data yang diminta pada aplikasi IGA (eviden) dikatakan gagal karena tidak tercapai sesuai target, tapi untuk capaian kinerja sudah masuk kategori sangat berhasil tapi tidak mempengaruhi terhadap capaian kinerja secara keseluruhan. Langkah yang dilakukan untuk mengatasi kegagalan adalah adanya peningkatan proses perencanaan inovasi pada tahapan pra pelaksanaan inovasi sampai dengan pengaplikasian atau pelaksanaan inovasi dapat dikoordinir dengan baik sehingga data (eviden) yang diminta pada aplikasi IGA dapat dipenuhi.

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Sebagai upaya untuk mewujudkan kinerja yang baik, tentunya harus didukung dengan sumber daya yang memadai serta dapat dipertanggung jawabkan penggunaannya berupa :

- Sumber daya manusia yang berkompeten
- Sumber dana yang mencukupi

- Sarana dan prasarana yang memadai

Kondisi Ideal	Kondisi saat ini	Kekurangan/Kelebihan	Tindak lanjut
Jumlah ideal SDM yang sesuai dengan anjab 36 ASN	Saat ini kondisi SDM Badan Kesbangpol jumlah 19 personil dengan latar belakang pendidikan yg bervariasi	Masih di butuhkan sekitar 17 orang yang mempunyai kelas jabatan serta persyaratan jabatan yang sesuai	Mengisi kekurangan jabatan yang ada dengan mengangkat tenaga teknis yang kompeten agar pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan
Sumber dana yang dapat menuntaskan semua permasalahan dan memfasilitasi konflik, monitoring dan pemberdayaan ormas serta pemantauan terhadap warga negara asing.	Saat ini sumber dana belum dapat mencukupi untuk kebutuhan operasional Badan Kesbangpol terutama operasional untuk penanganan konflik yang terjadi, monitoring ormas dan pemantauan terhadap warga negara asing yang ada di Pesisir Selatan	Masih membutuhkan sumber dana/anggaran yang dapat mendukung tujuan dan sasaran dari Badan Kesbangpol	Mengajukan permintaan dana aspirasi dari anggota dewan baik kabupaten dan propinsi serta berkoordinasi dengan Kantor Imigrasi Klas I Padang
Tercukupinya sarana dan prasarana kerja untuk mendukung operasional baik di kantor maupun di lapangan	Sarana dan prasarana yang ada saat sekarang belum mampu mendukung terlaksananya kegiatan baik di kantor maupun lapangan	Masih membutuhkan baik alat (komputer, printer), kendaraan dinas untuk meninjau situasi konflik sampai ke pelosok kecamatan dan pemantauan terhadap warga negara asing yang ada di Pesisir Selatan	Mengajukan/usulan pengadaan alat pendukung operasional kantor

7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Perjanjian Kinerja

Tujuan dan sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat tercapai melalui pencapaian program dan di dukung oleh kegiatan yang dilaksanakan di tahun 2023 melalui output dari kegiatan tersebut. Adapun program dan kegiatan yang tercantum dalam rencana aksi tahun 2023 berikut disajikan capaian program dan kegiatan di tahun 2023 :

Tabel A.7
Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program dan Kegiatan	Indikator Program	Target	Realisasi
1.	Terwujudnya Pemerintahan Yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100%	95%
2	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100%	95%
3	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan dan menjaga lingkungan secara mandiri	Cakupan pencegahan atau tangkal dini konflik	Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Persentase konflik yang ditangani	100%	100%
		Cakupan peningkatan pendidikan wawasan kebangsaan dan pendidikan politik	1.Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan 2.Program Pembinaan dan	1.Jumlah Masyarakat yang meningkat wawasan kebangsaannya 2.Persentase hasil pembinaan dan	500 Orang 85%	589 Orang 100%

			Pengembangan Ketahanan Ekonomi , Sosial dan Budaya 3.Program peningkatan peran partai politik dan lembaga melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik 4.Program pemberdayaan dan pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya 3.Persentase pemahaman politik di kalangan masyarakat/ aparatur daerah serta terciptanya stabilitas politik pemerintahan yang kondusif di daerah 4.Orams yang Melaksanakan Aktivitas Sesuai Regulasi	85% 63 Ormas	100% 63 Ormas
--	--	--	---	---	----------------------------	-----------------------------

3.4 Realisasi Keuangan

Anggaran dan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah Badan Kesbangpol untuk tahun 2023 pelaksanaan program dan kegiatan yang menunjang pencapaian 3 (tiga) sasaran strategis yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023 tercantum pada tabel 3.4.1 di bawah ini:

No.	SASARAN STRATEGIS	TAHUN 2023		
		ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN
		(Rp.)	(Rp.)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Terwujudnya Pemerintahan Yang Akuntabel dan Berkinerja	3.239.597.082	3.113.053.926	96.09
2.	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	2.000.000	2.000.000	100
3.	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan dan menjaga lingkungan secara mandiri	20.164.017.056	1.901.218.001	54.27
TOTAL		23.405.614.138	5.016.271.927	21.43

Dari di atas dapat di lihat sebagai berikut:

- a. Plafon anggaran yang disediakan pada tahun 2023 sebesar Rp. 4.444.301.123,- kemudian pada perubahan anggaran penambahan sebesar 18.961.313.015,- yang penggunaannya untuk pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024. Sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 900.1.9.1/435/SJ tanggal 24 Januari 2023 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 dalam hal penganggaran Pilkada dibebankan pada APBD 2023 dan APBD 2024 dalam bentuk belanja hibah pada OPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Propinsi, Kabupaten/Kota. Berdasarkan kesepakatan TAPD dengan KPU dan Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan untuk kegiatan Pilkada dana hibah yang disepakati sebesar Rp. 47.406.263.085,- terdiri dari KPU sebesar Rp.35.505.458.085,- dan Bawaslu sebesar Rp.11.900.805.000,- telah dituangkan dalam berita acara yang menjadi dasar pencantuman besaran anggaran kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dalam APBD 2023 dan APBD 2024, yang mana wajib dianggarkan pada tahun anggaran 2023 sebesar 40% (empat puluh persen) dan tahun anggaran 2024 sebesar 60% (enam puluh persen) dari besaran total dana hibah yang disepakati. Dari 40 % (empat puluh persen) besaran dana hibah yang dianggarkan di tahun 2023 yaitu Rp. 18.961.313.015,- hanya dapat dicairkan sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah,-) hal ini dikarenakan ketidaksediaan anggaran pada kas daerah.
- b. Pencairan sisa anggaran hibah 40% tersebut dilaksanakan pada tahun 2024 dan telah masuk pada DPA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sekaligus dengan pencairan hibah yang 60%.
- c. Pencairan dana hibah yang 60% (enam puluh persen) dapat dicairkan 5 bulan sebelum pemungutan suara.

IV. PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Penyelenggaraan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 merupakan tahun ke 3 (tiga) dari Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 2021 – 2026. Keberhasilan yang dicapai berkat kerjasama dan partisipasi semua pihak dan dapat dipertahankan serta ditingkatkan. Untuk target-target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak. Hasil laporan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat disimpulkan :

1. Capaian Sasaran

Dari 3 (tiga) sasaran yang telah ditetapkan, 1 (satu) sasaran mempunyai capaian indikator kinerja mencapai lebih dari 100% atau lebih, dan rata-rata nilai capaian indikator kinerja dengan nilai tertinggi adalah 129% yaitu “Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan menjaga lingkungan secara mandiri”. Untuk nilai terendah dari 3 sasaran yang telah ditetapkan tersebut adalah 87% yaitu sasaran “Meningkatnya kualitas inovasi daerah”.

2. Capaian Indikator Kinerja

Dari 4 (empat) indikator kinerja yang telah ditetapkan sebanyak 2 (dua) indikator kinerja berhasil mencapai dan melampaui target dan 2 (dua) indikator yang tidak mencapai target. Adapun rata-rata seluruh nilai capaian indikator kinerja yang mencapai atau melampaui target adalah 129% dengan nilai tertinggi adalah 133% yaitu indikator kinerja “Cakupan peningkatan pendidikan wawasan kebangsaan dan pendidikan politik” sedangkan indikator kinerja yang nilainya terendah 87% yaitu indikator kinerja “Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah” hal ini disebabkan karena masih kurangnya data yang diupload pada aplikasi IGA.

3. Capaian Realisasi Anggaran dalam Pencapaian Sasaran

Plafon anggaran Badan Kesbangpol tahun 2023 teralisasi sebesar Rp 5.016.271.927,- atau sebesar 21.43% dari target alokasi yang ditetapkan sebesar Rp 23.405.614.138,-. Dari tiga sasaran strategis, capaian anggaran belanja sasaran strategis tertinggi adalah “Terwujudnya pemerintahan yang akuntabel dan berkinerja” yaitu 96.10% dan terendah adalah “Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan dan Menjaga Lingkungan Secara Mandiri” yaitu 69.44%.

4.2 Saran

Untuk mempertahankan dan meningkatkan pencapaian kinerja dan realisasi anggaran maka perlu dilakukan upaya-upaya antara lain:

1. Meningkatkan komitmen antar bidang di jajaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan dalam penerapan manajemen berbasis kinerja, khususnya dalam perencanaan kinerja maupun monitoring dan evaluasi capaian kinerja.
2. Mengoptimalkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber daya dan dana melalui berbagai program dan kegiatan yang berorientasi pada outcome sehingga tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat tercapai.
3. Melakukan koordinasi yang intensif serta meningkatkan kolaborasi antar bidang yang berada dalam lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan dan stakeholder lainnya, instansi pemerintah maupun pihak pihak terkait lainnya dalam pelaksanaan kegiatan.
4. Optimalisasi pelayanan internal maupun kepada masyarakat dengan menggunakan pengembangan IT dan e-Government



Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2023 ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan, penyempurnaan dokumen perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan tahun berikutnya serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.



LAMPIRAN



REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PESISIR SELATAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **HARDI DARMA PUTRA, S.H., M.Si**

Jabatan : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **Drs. RUSMA YUL ANWAR, M.Pd**

Jabatan : Bupati Pesisir Selatan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

BUPATI PESISIR SELATAN,

Drs. RUSMA YUL ANWAR, M.Pd

Painan, Oktober 2023
**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KABUPATEN PESISIR
SELATAN**



HARDI DARMA PUTRA, S.H., M.Si.
NIP. 19670901 198602 1 001



REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PESIR SELATAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai AKIP Perangkat Daerah	A (81)
2.	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi PD	100
3.	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dan Menjaga Lingkungan Secara Mandiri	Cakupan Pencegahan atau Tangkal Dini Konflik	80%
		Cakupan Peningkatan Pendidikan Wawasan Kebangsaan dan Pendidikan Politik	30%

	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp 3.241.597.082	APBD
2.	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Rp 68.117.800	APBD
2.	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Rp 19.998.858.085	APBD
4.	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Rp 97.041.171	APBD

BUPATI PESIR SELATAN,

Drs. RUSMA YUL ANWAR, M.Pd.

Painan, 22 Oktober 2023

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PESIR SELATAN**





**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jalan Rohana Kudus - P A I N A N

**KEPUTUSAN
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 900/ 08 /BKPol-PS/2023**

TENTANG

**INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2021 – 2026**

**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PESISIR SELATAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka memberikan informasi kinerja dan ukuran kinerja keberhasilan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam pencapaian tujuan dan sasaran pada Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 2021 – 2026, perlu ditetapkan indikator kinerja utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang spesifik, relevan dan terukur;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Perdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021- 2026, dengan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), Jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintahan Tahapan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2006 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negera Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026;
 10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 104 tahun 2021 tentang Rencana Strategis Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021-2026;
 11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 178 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PESIR SELATAN TAHUN 2021-2026.
- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama pada Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana tersebut dalam daftar Lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama Badan sebagaimana dimaksud diktum KEDUA merupakan acuan kinerja yang dipergunakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan untuk menetapkan:
1. Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan;
 2. Penetapan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan;
 3. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan;
 4. Evaluasi Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan;
 5. Pemantauan dan Pengendalian Kinerja Pelaksana Program dan Kegiatan Lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan;
- KETIGA : Capaian Indikator Kinerja Utama merupakan tolak ukur dalam penilaian kinerja Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Painan
Pada Tanggal : Januari 2023

Kepala Badan,



HARDI DARMA PUTRA, S.H.M.Si
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19670901198602 1 001



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PESISIR SELATAN

Nomor : 900/ 08 /BKPol-PS/2023

Tanggal : Januari 2023

Tentang : Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026

I. Penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 – 2026

PEJABAT : ESSELON II

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Tanpa Satuan	N/A	N/A	65 (B)	65 (B)	65 (B)	65 (B)
		Nilai AKIP Perangkat Daerah	Tanpa Satuan	BB (71.8)	BB (72)	A (81)	A (81.2)	A (81.5)	A (82)
2.	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi PD	Tanpa Satuan	N/A	100	100	100	100	100
3.	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dan Menjaga Lingkungan Secara Mandiri	Cakupan pencegahan atau tangkal dini konflik	%	80	80	80	80	100	100
		Cakupan Peningkatan Pendidikan wawasan kebangsaan dan Pendidikan Politik	%	N/A	N/A	30	30	35	35



PEJABAT : ESSELON III

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatnya Nilai Evaluasi Sakip Badan Kesbangpol	Nilai Komponen Perencanaan pada evaluasi SAKIP Badan Kesbangpol	Tanpa Satuan	BB (71.8)	BB (72)	A (81)	A (81.2)	A (81.5)	A (82)
2.	Meningkatnya Pelayanan Umum dan Kepegawaian Badan Kesbangpol	Tingkat Kepuasan Terhadap Layanan Kepegawaian	Tanpa Satuan	Memuaskan	Memuaskan	Memuaskan	Sangat Puas	Sangat Puas	Sangat Puas
3.	Meningkatnya Inovasi	Jumlah Inovasi Per Bidang (1)	Inovasi	N/A	1	3	3	3	3
4.	Meningkatkan Peran Forum Strategis Daerah dalam Pencegahan dan Penanganan Konflik	Persentase Rekomendasi Penanganan Konflik yang ditindak Lanjuti	%	80	80	80	80	100	100
5.	Meningkatnya Fasilitasi tentang Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa	Jumlah Penyelenggaraan Pendidikan Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa	Kali	N/A	2	2	3	4	5
6.	Menurunnya Penyakit Masyarakat	Persentase Penurunan Kasus Penyalahgunaan	%	N/A	3	2	2	1	1



		Narkoba							
		Persentase Penurunan Kasus Kenakalan Remaja	%	N/A	N/A	3	2	1	1
7.	Meningkatnya Peran Lembaga Politik/Ormas untuk Kesejahteraan Masyarakat	Persentase Aspirasi Masyarakat yang diterima dari Perwakilan Partai Politik	%	N/A	N/A	55	60	60	65

KINERJA OPERASIONAL

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Tersusunnya Dokumen Perangkat Daerah tepat waktu	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah yang disusun Tepat Waktu	Dokumen	3 (Renstra, RKA Perubahan, RKA)	3 (Renstra, RKA Perubahan, RKA)	3 (Renstra, RKA Perubahan, RKA)	3 (Renstra, RKA Perubahan, RKA)	3 (Renstra, RKA Perubahan, RKA)	3 (Renstra, RKA Perubahan, RKA)
2.	Meningkatnya Kualitas Data Kinerja Badan kesbangpol	Jumlah Dokumen Data Sektoral yang dikelola	Dokumen	N/A	3	3	4	4	5
3.	Meningkatnya Layanan Kepegawaian	Persentase Dokumen Kepegawaian Tepat Waktu	%	100	100	100	100	100	100



4.	Meningkatnya Kualitas Layanan Surat Menyurat	Persentase Layanan Surat Menyurat Sesuai SOP	%	100	100	100	100	100	100
5.	Meningkatnya SDM Kesbangpol	Jumlah Pelatihan Kantor Sendiri	Kali	N/A	N/A	1	1	1	1
6.	Informasi Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Jumlah Data Konflik	Konflik	5	10	10	10	10	10
7.	Meningkatnya Masyarakat yang Mengikuti Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa	Jumlah Masyarakat yang Mengikuti Penyelenggaraan Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa	Orang	N/A	500	500	500	500	500
8.	Meningkatkan Fasilitas Pencegahan dan Pengawasan PEKAT	Jumlah Penyelenggaraan Pencegahan Pekat	Kali	N/A	1	2	2	3	3
		Jumlah Penyelenggaraan Pengawasan Pekat	Kali	N/A	1	1	1	1	1
9.	Meningkatkan Efektifitas Kelembagaan Demokrasi	Persentase Lembaga Politik (Partai/Ormas) yang sesuai dengan Regulasi	%	80	80	80	80	85	85

II. Penjelasan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 – 2026

Agar seluruh stakeholder Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memiliki persepsi yang sama terhadap IKU Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026, maka setiap indikator akan dijelaskan terkait definisi operasional, formula perhitungan, sumber data dan perangkat daerah penanggung jawab/ pelaksana program untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Penjelasan masing-masing IKU Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah

Level dalam Resntra	: Indikator Kinerja Utama Sasaran
Definisi Operasional	: Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah merupakan nilai yang dikeluarkan oleh Tim Asesor Internal Pemerintah Daerah dengan melakukan penilaian secara mandiri berdasarkan ketentuan yang berlaku berdasarkan pada pemenuhan nilai pengungkit 60% dan hasil 40%. Nilai ini setiap tahunnya diberikan oleh Inspektorat Daerah sebagai Asesor sebagaimana tertuang dalam Permenpan RB no 26 tahun 2020.
Formula	: Hasil penilaian Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat Daerah
Sumber Data	: Laporan hasil penilaian Reformasi Birokrasi
Penanggung jawab	: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

2. Nilai AKIP Perangkat Daerah

Level dalam Resntra	: Indikator Kinerja Utama Sasaran
Definisi Operasional	: Nilai AKIP merupakan hasil penilaian terhadap Akuntabilitas Kinerja yang dinilai dari 4 komponen yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.
Formula	: Hasil penilaian Inspektorat Daerah
Sumber Data	: Laporan hasil evaluasi AKIP dari Inspektorat Daerah
Penanggung jawab	: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

3. Nilai Kematangan Inovasi PD

Level dalam Resntra	: Indikator Kinerja Utama Sasaran
Definisi Operasional	: Nilai kematangan inovasi merupakan nilai ambang batas minimal dari sebuah inovasi yang dihasilkan oleh perangkat daerah untuk di entrikan dalam aplikasi IGA Kemendagri.
Formula	: Hasil penilaian saat pengentrian kriteria inovasi pada aplikasi IGA
Sumber Data	: Aplikasi pengentrian kriteria inovasi dari Kemendagri
Penanggung jawab	: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

4. Cakupan Pencegahan atau Tangkal Dini Konflik

Level dalam Resntra	: Indikator Kinerja Utama Sasaran
Definisi Operasional	: Cakupan pencegahan atau tangkal dini konflik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam situasi dan peristiwa baik sebelum pada saat, maupun sesudah terjadi konflik yang mencakup pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pasca konflik.
Formula	: $\frac{\sum \text{potensi konflik yang terdeteksi, terbahas dan tertangani dalam rakor kewaspadaan dini masyarakat (KDM)}}{\text{X 100\%}}$

Sumber Data	: Σ konflik yang dilaporkan Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Penanggung jawab	: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
5. Cakupan Peningkatan Pendidikan Wawasan Kebangsaan dan Pendidikan Politik	
Level dalam Resntra	: Indikator Kinerja Utama Sasaran
Definisi Oprasional	: Persentase Kelompok masyarakat yang mendapatkan Pendidikan Wawasan Kebangsaan dan Pendidikan Politik
Formula	: $\frac{\Sigma \text{Kelompok masyarakat yang mendapatkan Pendidikan Wawasan Kebangsaan dan Pendidikan Politik}}{\Sigma \text{Kelompok masyarakat Sasaran Pendidikan Wawasan Kebangsaan dan Pendidikan Politik}} \times 100\%$
Sumber Data	: Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Agama; Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan
Penanggung jawab	: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
6. Nilai Komponen Perencanaan pada Evaluasi SAKIP Badan Kesbangpol	
Level dalam Resntra	: Kinerja Taktikal
Definisi Oprasional	: Nilai komponen perencanaan pada evaluasi SAKIP Badan Kesbangpol merupakan nilai komponen perencanaan yang terdapat pada LHE LKj.
Formula	: Nilai komponen perencanaan pada LHE LKj
Sumber Data	: Inspektorat Daerah
Penanggung jawab	: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
7. Tingkat Kepuasan Terhadap Layanan Kepegawain	
Level dalam Resntra	: Kinerja Taktikal
Definisi Oprasional	: Tingkat kepuasan terhadap layanan kepegawain merupakan level kepuasan terhadap layanan kepegawaian pada Badan Kesbangpol
Formula	: Tingkat perhitungan rata-rata kepuasan terhadap layanan kepegawaian
Sumber Data	: Bagaian Umum Kepegawaian
Penanggung jawab	: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8. Jumlah Inovasi Per Bidang (1)	
Level dalam Resntra	: Kinerja Taktikal
Definisi Oprasional	: Banyaknya inovasi yang dihasilkan oleh bidang
Formula	: Jumlah inovasi
Sumber Data	: Bidang pada Badan Kesbangpol
Penanggung jawab	: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
9. Persentase Rekomendasi Penanganan Konflik yang ditindak Lanjuti	
Level dalam Resntra	: Kinerja Taktikal
Definisi Oprasional	: Persentase konflik yang difasilitasi oleh Badan Kesbangpol
Formula	: $\frac{\text{Jumlah Konflik yang difasilitasi}}{\text{Jumlah Konflik}} \times 100\%$
Sumber Data	: Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik
Penanggung jawab	: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
10. Jumlah Penyelenggaraan Pendidikan Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa	
Level dalam Resntra	: Kinerja Taktikal
Definisi Oprasional	: Banyaknya Penyelenggaraan Pendidikan

Formula	: Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa
Sumber Data	: Jumlah Penyelenggaraan Pendidikan Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa yang dilaksanakan oleh Badan Kesbangpol dan partai politik
Penanggung jawab	: Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik
Penanggung jawab	: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
11. Persentase Penurunan Kasus Penyalahgunaan Narkoba	
Level dalam Resntra	: Kinerja Taktikal
Definisi Oprasional	: Merupakan Persentase Penurunan Kasus Penyalahgunaan Narkoba
Formula	: $\frac{(\text{Jumlah Kasus Penyalahgunaan Narkoba Tahun Berjalan}) - (\text{Jumlah Kasus Penyalahgunaan Narkoba Tahun Lalu})}{(\text{Jumlah Kasus Penyalahgunaan Narkoba Tahun Lalu})} \times 100\%$
Sumber Data	: Polres Pesisir Selatan
Penanggung jawab	: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
12. Persentase Penurunan Kasus Kenakalan Remaja	
Level dalam Resntra	: Kinerja Taktikal
Definisi Oprasional	: Merupakan Persentase Penurunan Kasus Kenakalan Remaja
Formula	: $\frac{(\text{Jumlah Kasus Kenakalan Remaja Tahun Berjalan}) - (\text{Jumlah Kasus Kenakalan Remaja Tahun Lalu})}{\text{Jumlah Kasus Kenakalan Remaja Tahun Lalu}} \times 100\%$
Sumber Data	: Satuan Polisi Pamong Praja
Penanggung jawab	: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
13. Persentase Aspirasi Masyarakat yang diterima dari Perwakilan Partai Politik	
Level dalam Resntra	: Kinerja Taktikal
Definisi Oprasional	: Merupakan Aspirasi Masyarakat yang diterima dari Perwakilan Partai Politik
Formula	: $\frac{\text{Jumlah Aspirasi yang dilaksanakan}}{\text{Jumlah Aspirasi yang diajukan Masyarakat}} \times 100\%$
Sumber Data	: Sekwan dan Bappedalitbang
Penanggung jawab	: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
14. Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah yang disusun Tepat Waktu	
Level dalam Resntra	: Kinerja Operasional
Definisi Oprasional	: Merupakan waktu yang harus ditepati saat menyampaikan laporan terkait
Formula	: Waktu terakhir penyampaian laporan sesuai permintaan dari instansi terkait
Sumber Data	: Sub Bagian Program Anggaran dan Keuangan
Penanggung jawab	: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
15. Jumlah Dokumen Data Sektoral yang dikelola	
Level dalam Resntra	: Kinerja Operasional
Definisi Oprasional	: Banyaknya Dokumen Data Sektoral yang dikelola
Formula	: Jumlah Dokumen Data Sektoral yang dikelola
Sumber Data	: Bidang di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Penanggung jawab	: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
16. Persentase Dokumen Kepegawaian Tepat Waktu	
Level dalam Resntra	: Kinerja Operasional
Definisi Oprasional	: Merupakan dokumen segala bentuk kegiatan yang berkaitan dengan

Formula	:	$\frac{\text{Jumlah Dokumen Kepegawaian Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Keseluruhan Dokumen Kepegawaian}} \times 100\%$
Sumber Data	:	Sub Bidang Umum dan Kepegawaian
Penanggung jawab	:	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
17. Persentase Layanan Surat Menyurat Sesuai SOP		
Level dalam Resntra	:	Kinerja Operasional
Definisi Oprasional	:	Merupakan acuan penerapan langkah-langkah alur surat masuk baik internal maupun eksternal secara tertib dan teratur dalam layanan Surat menyurat
Formula	:	$\frac{\text{Jumlah Layanan Surat Menyurat Sesuai SOP}}{\text{Jumlah Layanan Surat Menyurat}} \times 100\%$
Sumber Data	:	Sub Bidang Umum dan Kepegawaian
Penanggung jawab	:	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
18. Jumlah Pelatihan Kantor Sendiri		
Level dalam Resntra	:	Kinerja Operasional
Definisi Oprasional	:	Pelatihan kantor sendiri dilakukan untuk peningkatan kapasitas sdm pegawai Badan Kesbangpol.
Formula	:	Jumlah Pelatihan Kantor Sendiri
Sumber Data	:	Sub Bagian Program Anggaran dan Keuangan
Penanggung jawab	:	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
19. Jumlah Data Konflik		
Level dalam Resntra	:	Kinerja Operasional
Definisi Oprasional	:	Merupakan kegiatan pendataan pengumpulan data konflik yang ada di Pesisir Selatan
Formula	:	Jumlah Data Konflik
Sumber Data	:	Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik
Penanggung jawab	:	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
20. Jumlah Masyarakat yang Mengikuti Penyelenggaraan Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa		
Level dalam Resntra	:	Kinerja Operasional
Definisi Oprasional	:	Merupakan Masyarakat yang Mengikuti Penyelenggaraan Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa
Formula	:	Jumlah Masyarakat yang Mengikuti Penyelenggaraan Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa
Sumber Data	:	Sub Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa
Penanggung jawab	:	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
21. Jumlah Penyelenggaraan Pencegahan Pekat		
Level dalam Resntra	:	Kinerja Operasional
Definisi Oprasional	:	Merupakan kegiatan yang dilakukan untuk pencegahan Pekat
Formula	:	Jumlah Penyelenggaraan Pencegahan Pekat
Sumber Data	:	Sub Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Agama
Penanggung jawab	:	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
22. Jumlah Penyelenggaraan Pengawasan Pekat		
Level dalam Resntra	:	Kinerja Operasional
Definisi Oprasional	:	Merupakan kegiatan yang dilakukan untuk pengawasan Pekat
Formula	:	Jumlah Penyelenggaraan Pengawasan Pekat
Sumber Data	:	Sub Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Agama
Penanggung jawab	:	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

23. Persentase Lembaga Politik (Partai/Ormas) yang Sesuai dengan Regulasi

Level dalam Resntra

: Kinerja Operasional

Definisi Oprasional

: Merupakan Partai/Ormas yang terdaftar di Kemenkumham dan sesuai dengan standar yang ada.

Formula

:
$$\frac{\text{Jumlah Partai/Ormas yang sesuai dengan regulasi}}{\text{Jumlah Partai/Ormas yang ada di pesisir Selatan}} \times 100\%$$

Sumber Data

: Sub Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan

Penanggung jawab

: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK
KABUPATEN PESISIR SELATAN.



HARDI DARMA PUTRA, S.H., M.Si.
Pembina Tk. IV/b)
NIP. 19670901198602 1 001



- a. Tanggal/Tahun : 8 September 2023
- b. Lokasi : Jakarta
- c. Diberikan Oleh : Kementerian Dalam Negeri